

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi lokasi penelitian yang memberikan gambaran mengenai data penelitian. Selain itu bab ini juga menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam sub bab pembahasan berisi jawaban dari masalah penelitian, penafsiran temuan-temuan penelitian, serta integrasi antara hasil penelitian dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kota Surakarta merupakan salah satu kota otonom di Jawa Tengah yang terletak di antara  $110^{\circ} 45' 15''$  dan antara  $110^{\circ} 45' 35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 36'$  dan  $7^{\circ} 56'$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Surakarta adalah  $44,06 \text{ km}^2$  dan terbagi ke dalam 5 (lima) wilayah administrasi kecamatan, 51 (lima puluh satu) kelurahan, 602 (enam ratus dua) rukun warga, dan 2.708 (dua ribu tujuh ratus delapan) rukun tetangga. Lima kecamatan yang ada di Surakarta antara lain Kecamatan Laweyan yang terdiri dari 11 (sebelas kelurahan), Kecamatan Banjarsari memiliki 13 (tiga belas) kelurahan, Kecamatan Serengan terdapat 7 (tujuh) kelurahan, Kecamatan Pasar Kliwon ada 8 (delapan kelurahan) dan Kecamatan Jebres mempunyai 11 (sebelas) kelurahan. Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali

Kota Surakarta merupakan kota yang strategis karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas Selatan dan seringkali dijadikan sebagai kota transit. Peta Kota Surakarta disajikan di lampiran 1.

*commit to user*

Berdasarkan SK Walikota Nomor 413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan wilayah kumuh di Kota Surakarta adalah seluas 369,55 Ha yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dan 51 (lima puluh satu) kelurahan. Pemerintah Surakarta melalui memorandum program RKPKP membuat rencana aksi penanganan permukiman kumuh dengan melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berlandaskan SK yang sama, pemerintah Kota Surakarta menetapkan Kawasan Semanggi sebagai kawasan prioritas dalam penataan kawasan kumuh secara bertahap karena merupakan kawasan kumuh terluas di Kota Surakarta yaitu 76,03 Ha dan terbagi ke dalam lima kelurahan meliputi Kelurahan Sewu (7,15 Ha), Kelurahan Gandekan (7,76 Ha), Kelurahan Kedunglumbu (4,31 Ha), Kelurahan Sangkrah (28,7 Ha) dan Kelurahan Semanggi (30,57 Ha). Peta deliniasi Kawasan Semanggi disajikan di lampiran 1.

Kelurahan Semanggi merupakan salah satu kelurahan di Kota Surakarta dan masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Pasar Kliwon. Kelurahan Semanggi terletak di ketinggian rata-rata 92 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu rata-rata 19 – 32°C. Penduduk Kelurahan Semanggi merupakan campuran antara masyarakat Jawa dan Arab. Masjid dan majelis banyak ditemui di Kelurahan Semanggi. Kelurahan Semanggi memiliki luas wilayah 166.82 Ha pada tahun 2017 yang terbagi menjadi 23 Rukun Warga (RW). Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Semanggi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Premulung/ Sungai Tanggul, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Keli Jenes, Kelurahan Joyosuran, dan Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Peta wilayah administrasi Kelurahan Semanggi disajikan di lampiran 1

Kelurahan Semanggi dihuni 10.479 kepala keluarga atau 32.442 jiwa, dengan 2.888 KK di antaranya tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah bangunan hunian sebanyak 7.468 unit, dengan 49,16% atau sebanyak 3672 unit di antaranya masuk dalam deliniasi profil permasalahan bangunan kumuh sesuai SK Walikota. Masalah lain yang sering terjadi di Kelurahan Semanggi adalah drainase dari permukiman tidak dapat dialirkan ke sungai karena elevasi air sungai lebih tinggi daripada permukiman, sehingga ketika musim penghujan, air seringkali meluap dan menyebabkan banjir (Redaksi Web Tim Komunikasi Kotaku, 2018). Selain itu, penumpukan sampah juga terjadi yang berasal dari sampah rumah tangga dan tidak memenuhi standar teknis pengelolaan sampah. Masalah legalitas lahan juga terjadi di Kelurahan Semanggi, sebanyak 42,23% atau 3154 unit tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebanyak 9,8% atau 736 unit bangunan didirikan di atas tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik (SHM). Dari jumlah bangunan yang ada sekitar 246 unit di antaranya didirikan dengan tata letak tak beraturan, dan 279 di antaranya tak sesuai persyaratan teknis dan tak layak huni.

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk, wilayah Kelurahan Semanggi memiliki kepadatan penduduk beragam setiap RT-nya yaitu kepadatan penduduk rendah <150 jiwa/Ha, sedang 151-200 jiwa/Ha, tinggi 201-400 jiwa/Ha, dan sangat tinggi dengan kepadatan penduduk >400 jiwa/Ha. Sedangkan kepadatan penduduk keseluruhan di Kelurahan Semanggi termasuk memiliki kepadatan penduduk yang tinggi pada tahun 2017 yaitu 316,007/Ha. Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada kebutuhan dasar seperti tempat hunian juga bertambah, sedangkan luas lahan yang ada tetap. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak kebutuhan dasar lain seperti ketersediaan air

bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang harus terpenuhi, begitu pula dengan masalah yang terjadi semakin kompleks. Kepadatan penduduk setiap RT di Kelurahan Semanggi dapat dilihat di lampiran 1.

Berdasarkan kondisi yang ada, pemerintah Kelurahan Semanggi telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021, yaitu: “Terwujudnya Semanggi sebagai wilayah maju dan sejahtera yang bertumpu pada sektor pendidikan, perindustrian, serta perdagangan dan jasa.” Sementara untuk misinya antara lain:

- a. Pengembangan tata krama dan tata nilai budaya Jawa melalui penyelenggaraan even-even dan program pendukung lainnya.
- b. Mewujudkan keamanan dan ketertiban, melalui pelayanan public yang baik.
- c. Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses Pendidikan, antara lain dengan pengembangan sarana/prasarana Pendidikan usia dini dan sarana/prasarana Pendidikan menuju kota layak anak.
- d. Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses kesehatan diantaranya melalui pemberdayaan posyandu balita/lansia, perbaikan gizi masyarakat guna penekanan angka kematian bayi dan ibu

Penelitian ini berfokus di Kelurahan Semanggi karena Kelurahan Semanggi memiliki wilayah kumuh terluas jika dibandingkan dengan kelurahan lain yang masuk dalam Kawasan Semanggi yaitu 30, 57 Ha dan merupakan titik merah kawasan tersebut karena tingginya angka kemiskinan terutama di Semanggi Timur, pemukiman di bantaran yang rawan banjir, serta tidak stabilnya lapangan pekerjaan.

#### **B. Gambaran Kondisi Kelurahan Semanggi Berdasarkan Indikator Permukiman Kumuh**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat tujuh kriteria kekumuhan yaitu jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. Dari

berbagai indikator yang ada, dilakukan scoring untuk mengetahui tingkat kekumuhan di wilayah tersebut. Apabila persentase skornya 25-49 disebut kumuh ringan, 50-74 kumuh sedang, 75-100 kumuh berat. Selain persentase setiap indikator, terdapat angka untuk mengukur akumulasi dari indikator-indikator yang ada, yaitu <19 masuk dalam kategori tidak kumuh, 19-44 kumuh ringan, 44-70 kumuh sedang, 70-100 kumuh berat. Masing-masing indikator seperti jalan, drainase, dan sebagainya memiliki skor lain yaitu 1, 3, dan 5. Penghitungan skor ini misalnya adalah jika terdapat sebuah jalan sepanjang 500 meter dan jalan tersebut rusak 250 meter, dilakukan perbandingan  $250 : 500$  kemudian hasilnya dipersenkan. Maka hasil dari perbandingan tersebut adalah 50%. Skoring 1 berada di rentang 25%-50%, skoring 3 di rentang 50%-75%, dan skoring 5 di rentang 75%-100%. Berikut ini merupakan data *baseline* profil permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Semanggi sesuai dengan kriteria kekumuhan:

**Tabel 4.1 Profil Permasalahan Permukiman di Kelurahan Semanggi**

PROFIL PERMASALAHAN PERMUKIMAN					
Provinsi	: JAWA TENGAH	Luas Kumuh	30,57	Ha	
Kab/Kota	: Surakarta	Jumlah Bangunan	3.672	Unit	
Kecamatan	: Pasar Kliwon	Jumlah Penduduk	15.896	Jiwa	
Kelurahan	: Semanggi	Jumlah KK	5.157	KK	
Luas Permukiman	: 102,662 Ha	Jumlah MBR	1.417	KRT	
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE (%)	NILAI
A. FISIK					
1. Kondisi Bangunan Hunian	a. Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	246,00	Unit	6,70%	0
	b. Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai	-	Ha	0,00%	0



	ketentuan				
	c. Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	279,00	Unit	7,60%	0
<b>2. Kondisi Jalan Lingkungan</b>	a. Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3.755,00	Meter	14,79%	0
	b. Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	11.115,40	Meter	43,77%	1
<b>3. Kondisi Penyediaan Air Minum</b>	a. Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1.304,00	KK	25,29%	1
	b. Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	332,00	KK	6,44%	0
<b>4. Kondisi Drainase Lingkungan</b>	a. Area terjadi genangan >30 cm, > 2 jam > 2x setahun	20,02	Ha	61,53%	3
	b. Area tidak tersedia drainase lingkungan	16.615,00	Meter	37,37%	1
	c. Drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	6.400,00	Meter	14,39%	0
	d. Area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau (tidak terpelihara)	40.452,00	Meter	90,97%	5
	e. Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	28.553,00	Meter	64,21%	3
<b>5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah</b>	a. Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standard teknis	333,00	KK	6,46%	0
	b. Area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	261,00	KK	5,06%	0
<b>6. Kondisi Pengelolaan Persampahan</b>	a. Area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	4.580,00	KK	88,81%	5
	b. Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standard	134,00	KK	2,60%	0
	c. Area memiliki sarpras persampahan yang tidak	4.801,00	KK	93,10%	5

	terpelihara				
<b>7. Kondisi Proteksi Kebakaran</b>	a. Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1.554,00	Unit	42,32%	1
	b. Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	-	Unit	0,00%	0
<b>B. NON FISIK</b>					
<b>1. Legalitas Pendirian Bangunan</b>	a. Bangunan hunian tidak memiliki IMB	3.154,00	Unit	85,89%	
	b. Bangunan hunian tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui Pemerintah	736,00	Unit	20,04%	
<b>2. Kepadatan Penduduk</b>	jiwa/ha	489	jiwa/Ha		
			<b>SCORE AWAL</b>	<b>25</b>	
			<b>KATEGORI</b>	<b>KUMUH RINGAN</b>	

Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Semanggi Tahun 2017

### 1. Kondisi Bangunan Hunian

Sebagian besar muka rumah di Kelurahan Semanggi tidak menghadap ke jalan dan saling membelakangi antara satu rumah dengan rumah lainnya karena pada saat membangun, masyarakat tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu sehingga kelayakan bangunan masih di bawah standar teknis.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator KOTAKU dalam pernyataan berikut:

“Warga terdampak itu buat makan saja susah, apalagi untuk sekolah paling banter itu sampai SMP rata-rata, apalagi untuk bikin rumah di tanah illegal, ya pasti seadanya yang penting bisa untuk tidur.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pola permukiman di Kelurahan Semanggi terdiri dari permukiman campuran yang berkembang mengikuti jaringan jalan yang ada atau memusat pada pusat-pusat pelayanan dan permukiman miskin dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Gambar permukiman Kelurahan Semanggi disajikan di lampiran 2.

## 2. Kondisi Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Semanggi memiliki lebar bervariasi antara 1,5 meter sampai dengan 3 meter. Untuk jalan yang memiliki lebar >1,5 meter hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Kondisi jalan masih berupa jalan tanah (tidak diperkeras) dan sudah diperkeras tetapi sudah rusak, serta sebagian besar jalan gang tidak dilengkapi dengan jaringan SPAL dan atau drainase serta penerangan jalan. Gambar jalan lingkungan Kelurahan Semanggi disajikan di lampiran 2.

## 3. Kondisi Penyediaan Air Minum

Jaringan air minum di Kelurahan Semanggi dipenuhi dari jaringan PDAM dan hanya terdapat jaringan PDAM sepanjang 1.222 meter dan jumlah pelanggan PDAM sebanyak 246 KK (PS 2013). Selain menggunakan PDAM sebagai sumber air bersih, masyarakat kelurahan Semanggi menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih. Jumlah sumur gali di kelurahan Semanggi diperkirakan sebanyak 514 unit yang digunakan oleh sekitar 514 KK, selain itu masyarakat juga mempunyai sumur pompa sebanyak 2 unit dan PAM umum sebanyak 3 unit. Jaringan perpipaan air bersih di kelurahan Semanggi tidak ada karena tidak adanya sumber mata air yang biasa digunakan sebagai sumber air bersih, di kelurahan Semanggi. Terdapat sekitar 21 % rumah tangga yang belum terakses sarana sumur terlindung dan PDAM di wilayah Kelurahan Semanggi yaitu Lingkungan Semanggi lauq, Semanggi Daya dan Semanggi selatan. Gambar penyediaan air minum Kelurahan Semanggi disajikan di lampiran 2.

## 4. Kondisi Drainase Lingkungan

Kondisi sebagian besar fungsi drainase di Kelurahan Semanggi, terutama drainase primer (sungai) telah tercemar oleh aktifitas masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan untuk drainase sekunder, kondisinya rata-rata mengalami pendangkalan karena endapan lumpur dan



tanah serta tersumbat oleh sampah. Hal ini akan menimbulkan masalah terutama ketika musim penghujan datang, air akan meluap ke permukaan jalan dan menggenangi permukiman warga karena sekitar 77% jaringan jalan memiliki drainase yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Saluran air yang diduduki rumah warga itu bikin banjir karena kan tidak bisa dibersihkan, apalagi warga masih banyak yang buang sampah di saluran air.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Gambar drainase lingkungan Kelurahan Semanggi disajikan di lampiran 2.

#### 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Limbah yang dihasilkan dari aktifitas penduduk Kelurahan Semanggi meliputi limbah domestik rumah tangga, limbah tinja manusia dan ternak, dan limbah industri. Saluran pembuangan limbah rumah tangga untuk limbah domestik seperti air bekas mandi, pencucian, dan dapur masih menyatu dengan drainase lingkungan. Sementara limbah kotor berupa limbah pekat dari tinja, sebagian masyarakat ada yang langsung membuangnya ke saluran spal dan drainase. Gambar pengelolaan air limbah Kelurahan Semanggi disajikan di lampiran 2.

#### 6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil baseline, 98% sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman Kelurahan Semanggi terangkut ke TPA/TPS setiap dua kali seminggu. Masalah terkait persampahan di Kelurahan Semanggi adalah masyarakat masih membuang sampah di sempadan kali, saluran/drainase, pekarangan atau lahan kosong, atau mengumpulkan sampah-sampah tersebut di depan rumah kemudian membakarnya. Hal ini disampaikan oleh Lurah Semanggi dalam pernyataan berikut:

“Warga memang pelan-pelan diberi pengertian kalau membakar sampah itu mengganggu lingkungan, tapi memang masih susah karena sudah menjadi kebiasaan.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Gambar masalah persampahan di Kelurahan Semanggi disajikan di lampiran 2.

#### 7. Kondisi Proteksi Kebakaran

Sampai saat ini, belum pernah terjadi kebakaran secara besar di Kelurahan Semanggi, namun potensi kebakaran sangat rentan terjadi karena permukiman penduduk yang padat serta masyarakat belum memiliki kesiapan mengenai sarana antisipasi dan pencegahan kebakaran seperti *hydrant*, minimnya sumber air di ruang terbuka, dan jalur mitigasi. Hal ini disampaikan oleh Lurah Semanggi dalam pernyataan berikut:

“Selama saya menjabat, belum pernah ada kebakaran ya, tapi memang dari KOTAKU bekerja sama dengan Damkar.” (Wawancara 7 Oktober)

#### C. Deskripsi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program nasional yang berjalan di seluruh wilayah kabupaten/kota dan menjadi basis penanganan permukiman kumuh melalui penggalangan potensi sumber daya maupun pendanaan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya dengan mengusung platform kolaborasi untuk mendukung gerakan 100-0-100 yaitu 100% akses universal air minum, 0% lingkungan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Melalui program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat untuk bersama memelihara lingkungan sehingga program yang dilaksanakan mengalami keberlanjutan.

Program KOTAKU merupakan program lanjutan dari program-program yang sudah ada sebelumnya seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan yang bertujuan untuk membangun dan menginternalisasi prinsip dan nilai melalui proses pemberdayaan masyarakat: membangun kesadaran kritis, pengorganisasian masyarakat, dan pengorganisasian potensi sumber daya. Program nasional yang telah dilaksanakan memberikan

pembelajaran penting dalam pengembangan Program KOTAKU karena memberikan hasil di antaranya peningkatan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat bisa berdaya mandiri serta terbentuknya kelembagaan di tingkat masyarakat. Berdasarkan pembelajaran tersebut, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Program KOTAKU guna melakukan intervensi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar sebagai upaya mewujudkan gerakan 100-0-100 melalui platform kolaborasi. Program KOTAKU diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019.

Permukiman kumuh menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Batasan sarana prasana yang terdapat dalam undang-undang meliputi: jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. Selain dilihat dari karakter fisik, identifikasi permukiman kumuh juga perlu dilihat dari karakteristik non fisik seperti perilaku masyarakat sehingga dapat ditemukan penyebab dari adanya permukiman kumuh tersebut. Masalah permukiman kumuh merupakan masalah yang kompleks sehingga pemerintah menginisiasi platform kolaborasi melalui Program KOTAKU. Program tersebut dirancang bersama pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai nahkoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup:

- 1) Pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota;

- 2) Penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll);
- 3) Perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh;
- 4) Penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

Pelaksanaan Program KOTAKU berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

a. Tujuan Program KOTAKU

Tujuan program KOTAKU yang tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh;
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Secara garis besar, pencapaian tujuan diukur dengan menggunakan indikator “outcome” sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.1 drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
- 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
- 4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh;
- 5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

b. Penyelenggaraan Program

Penyelenggaraan program di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berorientasi “outcome”. Setiap kabupaten/kota menetapkan tujuan program dan tujuan antara yang diukur dengan indikator “outcome” yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam RPJMN, yaitu:  
(1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan



perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l: drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan Ruang Terbuka Publik); (2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; (3) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan (4) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU.

- 2) Memanfaatkan hasil pendataan kumuh. Masing-masing kabupaten/kota memanfaatkan data hasil pendataan kumuh serta ketetapan pemerintah daerah dalam SK Kumuh, Perda Kumuh, dll, sebagai kondisi awal dan merumuskan target capaian mengacu pada kondisi awal tersebut. Begitu pula di tingkat masyarakat kelurahan, dirumuskan pula kerangka keberhasilan dan monitoring program sesuai dengan kondisi awal hasil pendataan kumuh di masing-masing kelurahan.
- 3) Review atau penyusunan dokumen perencanaan kumuh. Perencanaan di tingkat kabupaten/kota (RP2KP-KP/SIAP) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan di tingkat kelurahan/desa (RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM) dikoordinasikan oleh TIPP. Bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki dokumen rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota, seperti dokumen RKPKP, maka perencanaan mencakup proses review untuk memastikan jika rencana yang sudah disusun memenuhi substansi yang dibutuhkan untuk penanganan seluruh permukiman kumuh di kota yang bersangkutan dengan jangka waktu lima tahun. Dalam beberapa kasus, RKPKP yang telah disusun hanya mencakup perencanaan untuk satu kawasan, belum mencakup keseluruhan permukiman kumuh yang diidentifikasi dalam pemetaan kumuh. Dalam kasus tersebut, RKPKP

masih perlu dilengkapi/disempurnakan. Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki dokumen RP2KP-KP/SIAP maka perencanaan mencakup penyusunan dokumen rencana penanganan permukiman kumuh (RP2KP-KP/SIAP). Perencanaan juga mencakup penyusunan Desain kawasan dan DED kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan. RP2KP-KP/SIAP dan DED harus dilengkapi dengan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai kebutuhan setempat berdasarkan hasil penapisan dan penilaian dampak lingkungan dan sosial.

- 4) Selaras dengan sistem perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa harus terintegrasi dan selaras dengan sistem perencanaan kabupaten/kota; Dalam hal ini terintegrasi dengan misi RPJMD, RTRW kabupaten/kota, atau dokumen lainnya yang relevan.
- 5) Dukungan pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk dana stimulan diberikan hanya bila kabupaten/kota yang terpilih telah memenuhi komitmennya, yaitu: (1) membangun kelompok kerja untuk memimpin dan memfasilitasi proyek, (2) mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional selama implementasi proyek, (3) memasukkan rencana penanganan permukiman kumuh dalam RPJMD, dan menjajaki inklusi isu terkait kumuh di dalam RTRW atau perencanaan kota lainnya, (4) menyiapkan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota seperti RP2KP-KP/SIAP, RKPKP, RP3KP, atau dokumen serupa.
- 6) Pelaksanaan kegiatan. Semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan di dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten/kota maupun kelurahan/desa dan dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, mengacu pada kebijakan daerah dan kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup dan sosia. Kegiatan dipilah menjadi

kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Bila melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor maka pelaksanaan dilakukan melalui pola *e-procurement* agar transparan.

- 7) Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana dan kesetaraan gender. Mengarusutamakan pengelolaan lingkungan dan sosial (termasuk pengurangan risiko bencana) sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh komponen penyelenggaraan program.

#### **D. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilaksanakan secara nasional di 217 kabupaten/kota di 34 provinsi. Program ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019. Dalam pelaksanaan program KOTAKU, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi platform kolaborasi dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaksana program KOTAKU untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi program, di antaranya adalah: Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Disperum KPP Kota Surakarta, Koordinator Kota program KOTAKU Kota Surakarta, Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan program KOTAKU Kota Surakarta, Kasubid Infrastruktur Kota Bapedda Kota Surakarta, Lurah Semanggi Kota Surakarta, Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, Fasilitator program KOTAKU Kelurahan Semanggi Kota

Surakarta, Unit Pengelola Lingkungan Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, dan warga Kelurahan Semanggi yang terdampak program KOTAKU.

Pelaksanaan program KOTAKU berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Surat Edaran tersebut berisi panduan dan informasi menyeluruh tentang program KOTAKU bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan sebagainya dalam pelaksanaan program. Sementara untuk pelaksanaan di tingkat kelurahan, terdapat petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan/desa yang berisi penjabaran dari pedoman umum sehingga pelaksana program di tingkat kelurahan memperoleh panduan yang lebih detail tentang proses, tahapan-tahapan, dan substansi penyelenggaraan program.

Program KOTAKU yang mengusung platform kolaborasi memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dalam penanganan permukiman kumuh yang membutuhkan beragam sumber daya dan dana dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Proses keseluruhan kegiatan dipimpin oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara pemerintah desa/kelurahan bekerja sama bersama dengan masyarakat dan kelompok peduli lainnya berpartisipasi aktif dan turut serta dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif. Tahapan-tahapan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi berdasarkan Teori Jones terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi, dan tahap aplikasi yang akan dianalisis dalam uraian sebagai berikut:

#### a. Tahap Pengorganisasian (*organized*)

Tahap pengorganisasian merupakan upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resource*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil/output) sesuai dengan apa tujuan dan sasaran kebijakan.

##### 1. Penentuan Sumber Daya Manusia

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang mengusung platform kolaborasi, sehingga banyak pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program. Tahap awal dalam penentuan sumber daya manusia dimulai dari tahap persiapan yang dilaksanakan melalui sosialisasi untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan kelurahan/desa dalam penyelenggaraan kolaborasi dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dilakukan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), dan masyarakat dengan didampingi oleh Tim Koordinator KOTAKU melalui fasilitator kelurahan.

LKM telah ada sejak sebelum program KOTAKU dilaksanakan, yaitu sejak program PNPM Mandiri. Pemilihan anggota LKM dilaksanakan dengan cara menunjuk warga yang dianggap memiliki keahlian yang dibutuhkan dibandingkan dengan warga yang lainnya serta memiliki nilai-nilai luhur. Penunjukan tersebut dilaksanakan dengan melalui sosialisasi dan diskusi terarah yang diikuti oleh warga masyarakat, Lurah Semanggi, dan didampingi fasilitator kelurahan. Setelah dipilih calon orang-orang yang akan mengisi keanggotaan LKM, selanjutnya dilakukan pemilihan ketua



dan anggota melalui pemilihan umum. Contoh form hasil pemilihan umum anggota LKM disajikan dalam lampiran 2.

Hal ini diungkapkan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut:

“Untuk LKM itu orangnya dari warga dengan konsep, kan itu sebenarnya LKM itu bukan seperti ada bendahara, sekretaris gitu tetapi seperti dewan amanah. Mereka dipilih berbasis nilai-nilai luhur, jadi orang baik, orang jujur, orang yang dapat dipercaya, seperti itu.”  
(Wawancara 9 Oktober 2020)

Hal yang sama diungkapkan oleh Lurah Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“LKM itu kan tidak baru ya, jadi sudah ada sejak lama. Dulu ada pemilihan umum kecil-kecilan. Orang-orangnya yang mau dipilih sendiri sama warga, yang kira-kira dilihat sama warga dia mampu.”  
(Wawancara 7 Oktober 2020)

Pelaksana program di Kelurahan Semanggi dalam proses perencanaan program selain dilakukan oleh LKM, juga dilakukan oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). TIPP merupakan tim perencanaan permukiman tingkat kelurahan yang terdiri dari beberapa kelompok kerja yang minimal sesuai dengan tujuh indikator kumuh atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kelurahan Semanggi melaksanakan kegiatan pembentukan atau penguatan TIPP setelah melakukan sosialisasi awal yaitu pada tahun 2016. Dalam pembentukan atau penguatan TIPP kegiatan awal yang dilakukan adalah sosialisasi pembentukan lembaga perencanaan permukiman tingkat kelurahan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan kegiatan sosialisasi awal. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah agar seluruh pihak memahami pentingnya lembaga perencanaan permukiman tingkat kelurahan/desa dan membangkitkan kesadaran warga untuk peduli dan memiliki keterampilan di bidang permukiman, terlibat aktif dalam perencanaan penataan lingkungan permukiman. Setelah sosialisasi

dilanjutkan dengan review keberadaan TIPP untuk mengetahui fungsi yang sudah ada ataukah harus membentuk TIPP baru.

Penggalangan relawan sebagai anggota TIPP dilaksanakan setelah melakukan review keberadaan TIPP. Dalam proses penggalangan relawan di Kelurahan Semanggi, tidak dilakukan identifikasi warga berdasarkan keahlian seperti dalam pedoman pelaksanaan program KOTAKU. Relawan di Kelurahan Semanggi dipilih berdasarkan komitmen dan nilai-nilai luhur yang dipegang oleh warga. Hal ini disampaikan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Untuk TIPP itu orangnya dari warga dengan konsep kan itu sebenarnya mereka dipilih berbasis nilai-nilai luhur, jadi orang baik, orang jujur, orang yang dapat dipercaya, seperti itu.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pemilihan anggota TIPP dipilih dengan cara mengusulkan nama-nama yang dianggap mampu mengemban amanah dalam menjalankan peran. Usulan nama tersebut disampaikan dalam *rembug* warga pada saat sosialisasi awal dilaksanakan. Pernyataan Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator KOTAKU ketika menjawab pertanyaan terkait dengan perekrutan TIPP, dalam pernyataan berikut:

“TIPP berasal dari warga masyarakat. Dari masyarakat dilihat dari nilai-nilai dan kepedulian.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Lurah Semanggi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Sistem penunjukan TIPP itu dari rapat kesepakatan warga. Kalau masa baktinya sudah selesai, nanti di RWT dipilih dulu pengurusnya, setelah pengurus terpilih mereka langsung memimpin rapat itu.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu warga yang terlibat dalam penunjukan TIPP seperti dalam pernyataan berikut:

“Awal sosialisasi itu ada pemilihan anggota, ya kita pilih dari warga sini siapa yang kira-kira bisa. Setelah dapat nama kita bisa bilang setuju apa tidak.” (Wawancara 30 Desember 2020)

Setelah anggota TIPP terpilih, LKM bersama Lurah Semanggi melakukan pengukuhan anggota. Selanjutnya, dilakukan peningkatan kapasitas TIPP melalui rangkaian pelatihan/coaching mengenai perencanaan partisipatif. Dalam melaksanakan tugas menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman, TIPP dibantu oleh tenaga ahli yang direkrut oleh lurah dan LKM. Rangkaian akhir dalam pembentukan atau penguatan TIPP adalah penyusunan rencana kegiatan untuk perencanaan partisipatif.

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi selain dilakukan oleh LKM bersama TIPP juga didampingi oleh fasilitator kelurahan yang merupakan bagian dari Tim Koordinator KOTAKU. Fasilitator kelurahan merupakan orang-orang yang direkrut oleh pemerintah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini diungkapkan oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi dalam pernyataan berikut:

“Kalau pendamping, kita direkrut dari Perkim Satker provinsi, satu SPK dengan tim Korkot. Jadi Satker menginformasikan lewat media masa tentang kebutuhan pendamping. Jadi faskel atau pendamping lama maupun baru itu bisa ikut. Kemudian kita mendaftar secara online, ada seleksi administrasi, setelah seleksi administrasi kita melakukan tes online. Baru setelah itu diumumkan yang lolos siapa saja sambil kita menunggu SK penempatan.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Lebih lanjut lagi dalam pernyataan selanjutnya, karena ditempatkan berdasarkan surat keputusan, sehingga fasilitator harus bersedia ditempatkan di manapun. Hal ini berarti mereka memerlukan adaptasi di lingkungan baru serta harus belajar dari akar tentang kondisi dan situasi di kelurahan yang mereka damping. Hal ini disampaikan dalam pernyataan berikut:

“Kita mau tidak mau kan harus memahami kelurahan yang akan kita dampingi, karena keputusannya kita harus bersedia ditempatkan di mana saja.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Pernyataan yang sama juga rekrutmen pendamping diungkapkan oleh Koordinator KOTAKU dalam kutipan berikut ini:

“Kita ada rekrutmen dari kementerian PU, untuk pendamping jelas semuanya profesional karena kalau rekrutmen kan disaring, minimal harus sarjana dan berpengalaman makanya betul-betul saringan. Tetapi walaupun saringan, pintar misanya IPK-nya bagus, tetapi harus dilandasi dengan komitmen, karena yang paling penting kan hati nurani. Pintar saja kalau tidak punya nurani ya tidak cukup, makanya kita sering koordinasi, sering dikumpulkan.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Hambatan dalam proses pengorganisasian yang ditemukan, menurut Lurah Semanggi adalah sulitnya mencari pengganti untuk relawan yang menjadi anggota LKM dan TIPP, karena sumber daya yang dianggap mumpuni masih terbatas. Meskipun warga dipilih berdasarkan nilai-nilai luhur, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan dari warga masyarakat sendiri. Selain itu banyaknya jumlah dana yang dikelola ikut pula menjadi pertimbangan sehingga pelaksana program yang terpilih benar-benar merupakan orang yang amanah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lurah Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Kita kan kebanyakan warga masyarakat masih berpendidikan rendah, jadi untuk mengisi anggota juga memilihnya agak sulit ya. Kan dilihat juga bapak atau ibu ini kira-kira sanggup atau tidak. Terus KOTAKU itu kan dananya gede, jadi ya kita juga melihat siapa yang bisa dipercaya untuk mengelola.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Oleh karena sumber daya manusia yang dipilih lebih mempertimbangkan nilai-nilai luhur, LKM dan TIPP diberikan pelatihan-pelatihan yang memerlukan waktu tidak sebentar. Hal ini disampaikan oleh fasilitator Kelurahan Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Pendamping banyak berdiskusi dengan pelaksana di kelurahan. Kita sering kumpulkan dalam grup-grup kecil agar lebih fokus. Ya kita seperti belajar bareng LKM.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan penentuan sumber daya manusia dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan program KOTAKU, karena pemilihan sumber daya yang mengisi LKM dan TIPP tidak benar-benar dipilih berdasarkan keahlian, tetapi lebih mempertimbangkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran. Oleh karena itu, pelatihan LKM dan TIPP sangat diperlukan untuk mendukung kecakapan anggota LKM dan TIPP dalam pelaksanaan program. Sementara untuk fasilitator kelurahan, mereka ditempatkan berdasarkan surat keputusan, sehingga untuk fasilitator memerlukan waktu untuk beradaptasi dan memahami kondisi serta keadaan di mana mereka ditempatkan.

## 2. Penentuan Anggaran, Sarana, dan Prasarana

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), lembaga mitra pemerintah (*Corporate Social Responsibility/CSR*), serta swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Hal ini diungkapkan oleh Ketua LKM Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Dana kegiatan tadi dari APBN, APBD, CSR, swadaya masyarakat juga ikut membantu karena untuk infrastruktur warga kan terkadang mereka ikut iuran.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kasubid Infrastruktur Kota Bappeda Surakarta dalam pernyataan berikut:

“Kalau dana itu dari APBD, terus untuk yang KOTAKU untuk pakai APBN juga bisa. Untuk Semanggi sendiri yang sudah jalan itu memakai dana APBN, untuk Semanggi Utara itu menggunakan dana LON (pinjaman luar negeri) Cuma memang sangat lunak karena bunganya 1% setiap tahun. Itu yang nanggung pusat. Selain itu ada juga dari CSR sama kadang masyarakat ikut serta karena mereka ada kesadaran pembangun yang dilakukan untuk mereka.” (Wawancara 12 Oktober 2020)



Koordinator KOTAKU Kota Surakarta mengungkapkan pernyataan yang sama, sebagai berikut:

“Kolaborasi dana yang jelas itu satu dari pemerintah sendiri melalui APBN dan APBD, terus yang kedua dari CSR, terus yang ketiga dari swadaya masyarakat, tapi swadaya masyarakat itu kecil, makanya saya sebutkan di urutan yang terakhir karena kecil.” Wawancara 9 Oktober 2020)

Pengelolaan dana untuk pelaksanaan program KOTAKU dilakukan oleh LKM yang dipegang oleh Unit Pengelola Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Lurah Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Dana dari KOTAKU turun langsung ke LKM, jadi tidak di desa dulu tapi langsung ke pelaksana program.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Pernyataan ini dibenarkan oleh Ketua LKM Semanggi dalam kutipan di bawah ini:

“Kalau dana kita kelola sendiri ada UPK, Unit Pengelola Keuangan. Tapi tetap kita didampingi fasilitator.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program diperoleh dari dinas-dinas yang ditunjuk oleh walikota untuk membantu dalam menyukseskan program KOTAKU. Hal ini disampaikan oleh Kasubid Infrastruktur Kota Bappeda Surakarta dalam pernyataan berikut:

“DPUPR untuk penataan drainase, DLH untuk taman dan ruang terbuka hijau, Perkim mereka sebagai *leading sector*, kemudian ada Dinsos dan Dinas Perdagangan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, jadi tidak sekadar ditata terus direlokasi tetapi pembinaannya juga ada, pelatihan-pelatihan dasar juga ada.” (Wawancara 12 Oktober 2020)

Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan Kotaku Kota Surakarta memberikan pernyataan yang serupa terkait dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program, seperti dalam kutipan berikut ini:

“Kita ada dari PDAM membuat sarana MCK dan air bersih, lalu PLN membuat dan mensuplai bogensel komunal yang besarnya 20000 watt. Ada juga dari DLH, dia menanam pohon-pohon besar di lingkungan yang ditata, yang paling besar itu dari Balai Besar. Balai Besar Sungai Bengawan Solo itu satu paket telah berdiri membangun parabet. DPU juga memberikan lampu-lampu untuk penerangan jalan,

Terakhir dari Perindustrian, Koperasi, dan Perdagangan itu pemberdayaan usaha-usaha kecil, masyarakat di situ dilatih, dibina, khususnya warga yang di bantaran.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Penentuann sarana dan prasarana yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program mengalami kendala dalam pengadaan lahan yang akan diberikan untuk warga yang terdampak relokasi. Pengadaan lahan yang merupakan milik pemerintah kota dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tidak serta merta dapat langsung dilakukan karena memerlukan proses ganti nama hak milih lahan. Proses penggantian hak milik tersebut, dilakukan sampai ke Kementerian Keuangan dan harus melalui proses persidangan berkali-kali. Hal ini disampaikan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Jadi tanah itu proses pelepasan juga dari Balai Besar dan itu yang meminta Pak Wali juga. Itu juga tidak semudah yang kita kira karena kan sampai ke pusat. Jadi itu tanahnya di bawah PSDA Kementerian PU kan, berarti sampai ke kementerian untuk pelepasan asset kemudian masuk ke kementerian keuangan karena mau melepas asset dan ini mungkin prosenya panjang dan lama, sudah dari tahun 2017 sampai hari ini belum, masih dalam proses.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Penentuan lokasi penggunaan anggaran, sarana, dan prasarana dilakukan dengan merujuk pada lingkungan prioritas sesuai dengan SK Walikota. Hal ini disampaikan oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Kalau KOTAKU kita kan lebih ke penanganan pencapaian pengurangan kawasan kumuh sesuai SK walikota. Kita kan targetnya menolak kekumuhan. Biasanya kita sajikan data lokasi RT RW yang kumuh, kemudian kita bersama LKM dan perwakilan masyarakat kita rumuskan. Indikatornya sih satu, ketika kegiatan itu dilakukan paling tidak bisa mengurangi luasan kawasan kumuh yang lebih besar, priotitas utama kan yang lebih besar dulu. Jadi pengurangan kumuh dengan luasan yang lebih besar itu kita targetkan, karena dengan satu atau dua kegiatan ternyata bisa mengurangi luasan kawasan kumuh yang lebih besar dibandingkan dengan satu atau dua kegiatan untuk luasan kumuh yang lebih kecil. Dua, memandang permasalahan urgensi kegiatan di masyarakat, misalkan ada di luasan kumuh itu

yang lebih urgen masalah sanitasi maka support pendanaan lebih besar ke sanitasi. Jadi kita rumuskan mana yang lebih penting dahulu.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa penentuan anggaran, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam penyediaan sarana yaitu lahan yang akan diberikan kepada warga masyarakat karena proses birokrasi alih hak milik lahan memerlukan waktu yang lama dan proses yang panjang. Penggunaan anggaran, sarana, dan prasarana mematuhi ketentuan yang ada yaitu berdasarkan prioritas di dalam SK Walikota, dengan pertimbangan ketika penataan kumuh dilakukan, pengurangan luasan wilayah kumuh yang paling besar dapat dicapai sesuai tujuan program.

**b. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)**

Tahap interpretasi merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan kelompok sasaran kebijakan.

**1) Sosialisasi**

Tahap interpretasi program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dimulai dari tahapan sosialisasi dari kelurahan/desa hingga ke tingkat lingkungan melalui berbagai kegiatan dan berbagai media dengan harapan semakin banyak warga yang mengetahui dan memahami keberadaan program KOTAKU. Sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2016 hingga bulan Januari-Februari 2017. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dan dihadiri oleh pemerintah Kelurahan Semanggi dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Sosialisasi awal ini dimaksudkan agar pemerintah desa dan LKM selaku pelaksana program KOTAKU memiliki

pemahaman yang sama dan arah tujuan yang sama dengan pemerintah daerah. Tujuan tersebut disampaikan oleh dari Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Disperum KPP yaitu sebagai berikut:

“Tujuannya sama, yaitu untuk mendukung gerakan 100 – 0 – 100, 100 persen ketersediaan air bersih, 0 persen tanpa kumuh, dan 100 persen sanitasi layak.” (Wawancara 8 Oktober 2020)

Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan sebagai pendamping pelaksanaan program KOTAKU memberikan pernyataan yang sama dengan Disperum KPP:

“Tujuan KOTAKU kita kan Kota Tanpa Kumuh, jadi kita memang mendukung pencapaian target nasional 100 – 0 – 100, 100% air bersih, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi. Nah kita sebenarnya support di 0% kumuh itu.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pemahaman tujuan yang sama terlihat pula dari pernyataan yang disampaikan oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL) LKM Semanggi sebagai pelaksana program KOTAKU di tingkat kelurahan:

“Pada dasarnya tujuan program adalah untuk membantu mendukung target 100 – 0 – 100 yaitu 100% air bersih, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Proses terakhir dalam tahapan sosialisasi awal adalah *Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)* dan sosialisasi hasil RKM melalui berbagai media dan saluran. Lurah dan LKM melakukan lokakarya untuk membangun kepedulian seluruh pelaku agar kegiatan penataan permukiman, utamanya penanganan permukiman kumuh, pengumuman relawan yang mendaftar, dan pernyataan komitmen keikutsertaan dalam program KOTAKU terlaksana dengan sukses. Komitmen yang disepakati pelaku program KOTAKU yaitu: menurunnya luasan permukiman kumuh menjadi 0 hektar kumuh pada tahun 2019, mencegah munculnya permukiman kumuh baru, partisipasi aktif seluruh pelaku kelurahan, relawan dan agen sosialisasi, swadaya, dan mengikuti seluruh tahapan program KOTAKU.

Dari pelaksanaan sosialisasi awal dan RKM, keluaran yang diperoleh antara lain: pemetaan/daftar pelaku yang menjadi anggota agen sosialisasi dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), masyarakat mengetahui adanya kegiatan program KOTAKU, daftar relawan dan agen sosialisasi, serta berita acara komitmen masyarakat. Dokumentasi sosialisasi awal Program KOTAKU disajikan di lampiran 2.

Setelah pelaksana program KOTAKU memiliki pemahaman dan tujuan yang sama terkait pelaksanaan program, selanjutnya sosialisasi dan keberadaan program kepada masyarakat Kelurahan Semanggi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan sekali tetapi berkali-kali hingga masyarakat memahami dengan jelas terkait isi dan tujuan program KOTAKU. Hal ini disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan Semanggi berikut ini:

“Untuk sosialisasi kita lakukan berkali-kali sampai tujuan kita untuk menginformasikan tentang program KOTAKU dipahami dengan sungguh-sungguh oleh warga. Kalau melakukan FGD, kita lebih ke tim perumus. Kita mengumpulkan orang-orang yang tahu Semanggi seperti apa. Paling tidak walaupun hanya sedikit tetapi bisa mewakili Kelurahan Semanggi. Karena kan tidak mungkin setiap saat mengumpulkan semua warga untuk sosialisasi.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Tahapan awal pelaksanaan program KOTAKU yang salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan komitmen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan nol persen kumuh, mengalami kendala karena masyarakat beranggapan bahwa program KOTAKU sama dengan program yang dilaksanakan sebelumnya yaitu program PNPM. Selain itu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah turut menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi. Sehingga, diperlukan usaha yang besar dan waktu yang lumayan lama untuk mengubah pola pikir yang telah terbentuk di masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh ketua LKM Kelurahan Semanggi dalam kutipan wawancara berikut ini:



“Sebelum ada program KOTAKU kan ada program PNPM, masyarakat mikirnya programnya sama kayak gitu. Kalau PNPM, setiap ada usulan bisa langsung direalisasi, nah kalau KOTAKU kan kita harus sesuai dengan SK Walikota, Mbak. Yang ada di dalam SK, itu yang diprioritaskan.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Kendala mengenai ketidakpercayaan masyarakat disampaikan oleh Lurah Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Awal-awalnya mereka menolak itu pasti ada, karena yang pertama belum paham dengan maksud dan tujuan penataan, terus yang ke dua ya mereka *negative thinking* dululah dengan pemerintah. *Negative thinking* dulu, ya ada ketidakpercayaan lah, *tenanan pora to* pemerintah itu mau melakukan penataan kawasan kumuh, itu yang menjadi masalah utama mereka kan itu, pasti ada.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Selain itu ketidakpercayaan masyarakat terhadap program KOTAKU disampaikan pula oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta, menurut beliau di awal pelaksanaan program KOTAKU, ketidakpercayaan masyarakat muncul ketika mereka menganggap bahwa program KOTAKU merupakan produk salah satu partai yang digunakan untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat. Bahkan buku pedoman pelaksanaan KOTAKU yang memiliki sampul berwarna biru sempat menimbulkan masalah dan kecaman dari masyarakat karena dikaitkan dengan warna bendera partai. Pernyataan ini disampaikan beliau dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau dilihat dari sejarah dari awal-awal itu kan dulu Solo kan semua warga paham politik jadi agak riskan juga dan menganggap KOTAKU sebagai bagian dari politiknya partai Demokrat sedangkan Solo kan kental dengan PDI, jadi ya dulu sampai pedoman kita berwarna biru juga jadi masalah. Ya memang kita pendekatan level kota dahulu baru level kelurahan, tapi ya itu tadi di level kota saja kita sudah terblokir.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwa sosialisasi awal kepada pelaksana di tingkat kelurahan dan masyarakat dilakukan secara langsung dan berkali-kali. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi

mengalami kendala berupa sulitnya mengubah pola pikir masyarakat dan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## 2) Refleksi Perkara Kritis

Refleksi Perkara Kritis (RPK) dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat serta menggali akar penyebab, karakteristik terjadinya kumuh termasuk di dalamnya merefleksikan tentang penghidupan masyarakat (*livelihood*), bencana yang pernah terjadi, kesetaraan dan keadilan masyarakat dalam pembangunan serta dampak-dampak sosial dan lingkungan yang pernah terjadi pada pembangunan permukiman sebelumnya. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan terhadap kondisi lingkungan permukiman di wilayahnya, serta mampu memberikan solusi dan perbaikan terhadap kondisi lingkungan permukiman. Sehingga setiap warga dapat berkontribusi baik tenaga, waktu, pikiran, maupun uang secara bersama-sama melakukan penataan permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara *rembug* warga dan *focus group discussion* (FGD) oleh Lurah Semanggi, LKM Semanggi, dan TIPP. Dalam kegiatan *rembug* warga yang bertujuan membangun kesadaran mengenai kondisi permukiman, disampaikan terkait dengan target 100 – 0 – 100 dibandingkan dengan kondisi nyata lingkungan Semanggi serta perilaku hidup masyarakat selama ini terhadap lingkungan. Selanjutnya dilakukan FGD untuk menemukan penyebab dan potensi penyelesaian masalah permukiman kumuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua LKM Semanggi berikut ini:

“Kita banyak kegiatan *rembug* dengan warga, salah satunya RPK. RPK kita lakukan bersama dengan waktu sosialisasi awal itu. Ya di situ kita pancing warga biar mereka bisa tahu, ini kenapa kok bisa kumuh ya? Jadi mereka bisa ketemu penyebabnya” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Pernyataan serupa disampaikan pula oleh fasilitator Kelurahan Semanggi sebagai berikut:

“RPK itu kita lakukan bersama warga untuk mengidentifikasi penyebab dan seperti apa karakter kumuh Semanggi. Sehingga warga mengetahui, Semanggi masuk ke kawasan kumuh ringan, sedang, atau berat. Selain itu, mereka juga diajak berpikir potensi apa yang dimiliki oleh lingkungan mereka.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Kendala dalam pelaksanaan RPK adalah warga terdampak merupakan warga miskin dengan jenjang pendidikan rendah, maka diskusi terarah atau FGD tidak dilakukan secara formal, tetapi dalam bentuk *rembug* dengan bahasa ringan untuk memancing pola pikir warga Semanggi dalam memandang keadaan lingkungan mereka. Oleh karena itu, dalam kegiatan RPK penting untuk melakukan komunikasi aktif dengan warga terutama warga terdampak agar tidak ada lagi keraguan warga Semanggi terhadap pemerintah, sehingga warga Semanggi secara sadar dan sukarela turut berkontribusi dalam setiap proses pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini disampaikan oleh Koordinator KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“WTP (warga terdampak penataan) itu kan *wong cilik*, untuk makan saja mungkin dia keberatan lebih-lebih untuk membeli tanah. Itu saja diajak ngobrol, *jenenge wong ra nduwe diajak ngobrol, diajak rapat, disuguhi snack wae wis seneng*. Mereka jadi merasa dimanusiakan, itu saja sudah senang. Yang diundang jangan hanya RT/RW terus, tapi orang-orang yang terdampak itu langsung diajak ngobrol.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Tahapan terakhir dari RTK adalah sosialisasi hasil RTK kepada masyarakat. Keluaran dari tahap RTK antara lain: teridentifikasi permasalahan dan potensi pengembangan permukiman kelurahan, tergalinya harapan dan gagasan warga, dan adanya komitmen warga mewujudkan nol persen kumuh. Berikut ini merupakan hasil RPK terkait dengan potensi dan permasalahan permukiman di Kelurahan Semanggi:

**Tabel 4.2 Potensi dan Permasalahan Kawasan Permukiman Kelurahan Semanggi**

<b>Potensi Permukiman Kelurahan Semanggi</b>	Terdapat kawasan pendidikan antara lain SMA dan SD
	Berada dekat dengan kawasan cagar budaya sehingga berpotensi untuk pengembangan fasilitas penunjang kawasan pariwisata budaya
	Berada dekat dengan pusat kegiatan perekonomian Kota Surakarta
	Pola hubungan masyarakat baik
	Berpotensi sebagai pengembangan usaha rumah tangga
<b>Permasalahan Permukiman Kelurahan Semanggi</b>	Jaringan jalan masih terdapat perkerasan papan dan tanah
	Belum adanya fasilitas pelengkap jalan seperti pengaman jalan di permukiman atas air, pedestrian, dan fasilitas penerangan jalan
	Sebagian dari sistem jaringan drainase belum terintegrasi dengan sistem drainase
	Jaringan drainase yang ada mengalami sedimentasi dan terdapat sampah
	Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan permukiman rawan terhadap bencana kebakaran
	Terjadinya genangan karena saluran drainase yang tidak memadai
	Kapasitas badan jalan belum memenuhi standar pengamanan ancaman kebakaran

*Sumber: Analisis Bersama Masyarakat Kelurahan Semanggi Tahun 2017*

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan RTK dilakukan dengan cara formal dan informal melalui rembug warga dan diskusi terarah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RTK adalah warga terdampak merupakan warga miskin dengan jenjang pendidikan rendah sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait keberadaan program KOTAKU.

### 3) Pemetaan Swadaya (PS)

Pemetaan swadaya adalah proses kajian menemukan dan mengenali persoalan (lingkungan, sosial, ekonomi) dan potensi-potensi terhadap asset sumber daya manusia, alam, sosial, ekonomi, serta infrastruktur. Selain itu pemetaan swadaya juga melakukan kajian dalam memetakan akar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap kondisi riil/eksisting kawasan permukiman di wilayah kelurahan/desa.

Kegiatan pemetaan swadaya di Kelurahan Semanggi dilakukan oleh TIPP bersama masyarakat. Tahapan awal dari proses pemetaan swadaya adalah *mapping* permasalahan yang dilakukan oleh warga Semanggi. *Mapping* permasalahan bertujuan untuk melengkapi data yang digunakan sebagai *baseline*, yaitu data awal permasalahan permukiman di tingkat RT yang merupakan skala terkecil. Data baseline dihimpun berdasarkan tujuh kriteria kumuh yang mengacu pada Permen PU yaitu mencakup: (1) penataan bangunan, (2) jalan, (3) drainase, (4) air minum, (5) persampahan, (6) sanitasi, dan (7) proteksi kebakaran. Hal ini disampaikan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU dalam pernyataan berikut ini:

“Kegiatan kita ya memang seputar tujuh indikator tadi, cuma kan memang kita mulai dari *mapping* permasalahan, *mapping* juga dilakukan warga sendiri karena mereka yang tahu lingkungan mereka seperti apa, permasalahan mereka seperti apa. Kita ada kegiatan yang namanya *baseline*, *baseline* itu pendataan awal permasalahan permukiman yang ada di level RT. Kita membagi skala terkecil itu di RT. Masing-masing RT itu dilakukan pemetaan. Pemetaan dilakukan sesuai dengan tujuh indikator kumuh.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pernyataan tersebut sama dengan yang disampaikan oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi:

“Kalau pemetaan kan kita mencoba merumuskan permasalahan yang di lapangan sesuai indikator kumuh, jadi informasi itu didapatkan dari masyarakat. Kemudian kita susun dokumen perencanaannya, baru dokumen itu nanti kita sajikan ke stakeholder atau pemerintah untuk



di-review. Misalkan, satu RT itu ternyata ada masalah jalan, drainase, sumber pendanaan yang akan kita dapatkan dari mana seperti itu.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Data *baseline* berupa profil permukiman dan profil kumuh yang telah dihimpun oleh LKM bersama masyarakat di tingkat RT kemudian di-review oleh TIPP. Review data dilakukan untuk memahami sekaligus melakukan validasi isi data. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah konsolidasi data yang dilakukan TIPP bersama dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini meliputi konsolidasi kelengkapan data, dokumen perencanaan dan peta-peta yang diperlukan untuk menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Konsolidasi data juga dimaksudkan agar target yang akan dicapai di tingkat kelurahan sesuai dengan target pemerintah kota dan sasaran target antara KOTAKU dan pemerintah kota tidak mengalami tumpang tindih. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Disperum KPP dalam pernyataan berikut ini:

“Kita selalu melakukan sinkronisasi data melalui rapat dan sosialisasi, sehingga lokasi yang menjadi sasaran program penanganan kumuh tidak berada di satu lokasi yang sama. Tujuannya juga untuk pemerataan, tetapi kita saling bantu.” (Wawancara 8 Oktober 2020)

Hasil dari kegiatan konsolidasi antara lain: SK kawasan kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, dokumen perencanaan, data *baseline* dan profil permukiman. Dokumentasi konsolidasi data dan SK kawasan kumuh dalam lampiran 2.

Dari proses pelaksanaan pemetaan swadaya yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa pemetaan swadaya meliputi dua kegiatan yaitu *mapping* permasalahan dan konsolidasi data.

#### 4) Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Kegiatan terakhir dari tahapan interpretasi adalah penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). RPLP merupakan dokumen perencanaan permukiman/permukiman kumuh kelurahan/desa

*commit to user*

yang berlaku selama lima (5) tahun. Dokumen RPLP digunakan sebagai instrumen kolaborasi kelurahan/desa dalam penanganan permukiman kumuh yang disusun untuk mencapai nol persen kumuh di kelurahan dan mencegah tumbuhnya kumuh baru. RPLP memuat perencanaan penanganan permukiman yang komprehensif, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (livelihood) dan rencana penataan lingkungan permukiman secara spasial, yang terkonsolidasi dengan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) maupun rencana peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh tingkat kota maupun kelurahan lainnya. RPLP juga memuat rencana aksi keterpaduan program dari berbagai sumber pendanaan termasuk swadaya masyarakat, yang dibutuhkan untuk mendukung rencana penanganan tujuh aspek kumuh dan sosial ekonomi.

RPLP Kelurahan Semanggi disusun oleh TIPP bersama dengan LKM Semanggi dan Lurah Semanggi yang didampingi oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi dan Tim Koordinator KOTAKU serta pemerintah daerah melalui perwakilan Disperum KPP. Persiapan penyusunan RPLP meliputi kegiatan: melakukan pengumpulan dokumen peraturan dan kebijakan, melakukan peninjauan, pembahasan, dan penajaman terhadap kebijakan, isu strategis, penanganan dan profil kumuh, dan yang terakhir melakukan pemutakhiran profil kawasan kumuh. Arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman Kota Surakarta penulis sajikan di lampiran 2.

Persiapan penyusunan RPLP dilakukan dengan cara diskusi terarah (FGD) dan *rembug* warga. Ruang lingkup RPLP berlandaskan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016, di mana dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah berperan sebagai nahkoda dalam setiap pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surakarta melalui

Diperum KPP turut serta dalam proses penyusunan RPLP untuk memastikan bahwa rencana penanganan kumuh yang tertuang dalam dokumen RPLP Kelurahan Semanggi tidak bertentangan dengan RPJMD Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasubid Infrastruktur Kota Bappeda Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Kalau KOTAKU sendiri kan dasarnya memang Kementerian PU ya, fokus KOTAKU itu kan ada SK kumuh, berdasarkan RPJMN kemudian kita masukkan dalam RPJMD kita targetkan nol kumuh itu, fokusnya KOTAKU di situ. Jadi perencanaan kota atau kelurahan ya tidak bisa lepas dari RPJMD.” (Wawancara 12 Oktober 2020)

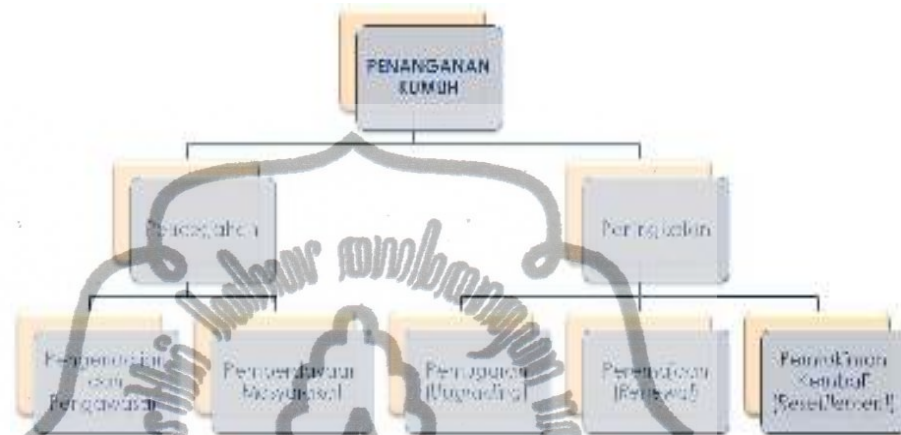
Hal yang sama diungkapkan pula oleh Koordinator KOTAKU Kota Surakarta dalam kutipan berikut:

“Untuk koordinasi sendiri, prinsip program KOTAKU adalah pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota sebagai nahkoda. Itu prinsip program. Jadi kita selalu memastikan setiap perencanaan sesuai dengan apa yang diinginkan nahkoda yang ada di RPJMD.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Setelah semua dokumen lengkap, penyusunan RPLP dilanjutkan dengan merumuskan skenario/*road map* langkah-langkah mewujudkan nol hektar kumuh dan mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati. Proses perumusan dilakukan dengan cara diskusi terarah oleh masyarakat Kelurahan Semanggi bersama LKM Semanggi dengan didampingi oleh TIPP, fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi, dan Tim Koordinator KOTAKU Kota Surakarta. Perumusan skenario dalam RPLP meliputi tiga kegiatan yaitu: (1) identifikasi program dan kegiatan penanganan kumuh yang telah dilaksanakan pada tahun 2015-2016 lalu membandingkannya dengan data baseline, (2) memeriksa dokumen perencanaan penanganan kumuh Kota Surakarta (RPJMD/RTRW/RDTR) untuk memastikan pola penanganan kumuh yang digunakan di Kelurahan Semanggi, (3) mengidentifikasi program penanganan kumuh yang akan dilaksanakan

pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang tertuang dalam RPJMD/RTRW/RDTR.

**Gambar 4.1 Skema Penanganan Kumuh**



Sumber: Dokumen RPLP LKM Semanggi Tahun 2016-2020

Berikut ini merupakan road map peningkatan kualitas permukiman kumuh Kelurahan Semanggi setelah proses perumusan skenario dilakukan:

**Tabel 4.3 Road Map Penanganan Kumuh Kelurahan Semanggi**

Kelurahan	Aspek	Jenis Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
Semanggi	Bangunan Hunian	Rehabilitasi bangunan yang melanggar aturan seperti berada di sempadan sungai/ sempadan pantai					
		Penataan kawasan dengan pengaturan pola bangunan					
		Penataan kawasan dengan pengaturan pola bangunan					
		Penataan kawasan dengan pengaturan pola bangunan					
		Penataan kawasan dengan pengaturan pola bangunan					
	Jaringan jalan	Peningkatan kualitas jalan dengan penambahan lebar jalan dan saluran drainase					
		Penambahan material dari tanah ke paving untuk memenuhi standar kelengkapan teknis					
		Penambahan material dari papan ke beton sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas					
		Penambahan fasilitas pelengkap jalan seperti pengaman jalan terutama yang berada di permukiman atas air					
		Perbaikan perkerasan jalan yang rusak di kawasan permukiman kumuh					
		Pemeliharaan jaringan jalan yang telah memenuhi syarat teknis					
		Pengerukan sedimentasi jaringan drainase					
	Drainase	Normalisasi saluran drainase yang tersumbat					
		Perbaikan perkerasan drainase yang rusak					
		Peningkatan kualitas unit sistem drainase					
		Penambahan segmen jaringan agar terintegrasi sistem drainase perkotaan sehingga tidak terjadi penangan					
		Pemeliharaan saluran drainase agar tetap berfungsi dengan baik					



Kelurahan	Aspek	Jenis Kegiatan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Air Bersih dan Air Minum		Penggunaan teknologi untuk pengendalian banjir di area yang berpotensi					
		Perbaikan sarana atau instalasi perpipaan air bersih dari bakteri yang berbahaya					
		Rehabilitasi unit Sistem Penyediaan Air Minum dengan penambahan Sambungan Rumah					
		Penyediaan sistem air baku alternatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk					
		Pemeliharaan sistem air baku alternatif					
Air Limbah		Perbaikan instalasi air limbah sekenipat dan terpusat yang mengalami penurunan kualitas					
		Perbaikan komponen sanitasi/pengelolaan air limbah					
		Penambahan instalasi pembuangan air limbah komunal di permukiman					
		Pemeliharaan sistem sanitasi lingkungan sehingga dapat berfungsi dengan baik					
Persampahan		Pembangunan prasarana dan sarana persampahan					
		Perbaikan dan penambahan komponen bangunan sarana prasarana persampahan					
Proteksi Kebakaran		Pembangunan sarana proteksi kebakaran					
		Pembangunan hidran air					
		Pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran					

Sumber: Dokumen RPLP LKM Semanggi Tahun 2016-2020

Tahapan selanjutnya setelah proses perumusan skenario penanganan kumuh adalah penyusunan rencana teknis yang dimulai dari sosialisasi di permukiman kumuh prioritas. Sosialisasi dilakukan bertujuan agar warga mengetahui dan paham bahwa di permukimannya akan dilaksanakan penyusunan perencanaan, selain itu diharapkan masyarakat juga mengetahui dan memahami isi dari rencana teknis penataan lingkungan permukiman sehingga masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan.

Setelah proses penyusunan selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah penyusunan draft RPLP yang di dalamnya berisi antara lain: alternatif konsep penanganan permukiman sesuai dengan visi dan misi permukiman Kelurahan Semanggi, rancangan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, rancangan skenario (*road map*)

*commit to user*



pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, dan rancangan investasi program dan kegiatan menyeluruh, skenario/road map pentahapan penanganan permukiman kumuh, dan rancangan Aturan Bersama. Penyusunan draft RPLP dilakukan oleh masyarakat bersama TIPP, Lurah Semanggi, dan LKM Semanggi didampingi oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi.

Tahapan terakhir dari proses penyusunan RPLP adalah pengesahan dokumen RPLP setelah dilakukan uji publik. Dokumen RPLP diajukan oleh TIPP kepada Lurah Semanggi dan LKM Semanggi untuk mendapat pengesahan. Lembar pengesahan dokumen RPLP diketahui dan ditandatangani oleh Walikota Surakarta.

Berikut ini merupakan rancangan pencegahan permukiman kumuh dan perumusan strategi peningkatan kualitas permukiman di Kelurahan Semanggi:

**Tabel 4.4 Pencegahan Permukiman Kumuh di Kelurahan Semanggi**

Kategori	Kelembagaan Permukiman (dari Pemetaan Swadaya)	Kebijakan Pencegahan	Strategi Pencegahan	Strategi Pencegahan
Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umumnya rumah di permukiman kumuh tua dan</li> <li>Bangunan tidak terlarut dengan aspal yang kurang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berencana untuk membangun bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspalisasi dan Paving</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di lingkungan kumuh/kumuh tua</li> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan di lingkungan kumuh/kumuh tua</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan-jalan dengan kondisi rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas jalan-jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspalisasi dan Paving</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>
Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditengah-tengah rumah yang tidak dapat menampung debit limbah</li> <li>Terdapat sedimen di area sekitar rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan jalan berlubang di area rumah</li> <li>Pemeliharaan rumah dan area rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan jalan berlubang di area rumah</li> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi tentang bahaya limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan jalan berlubang di area rumah</li> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan jalan berlubang di area rumah</li> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan jalan berlubang di area rumah</li> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan jalan berlubang di area rumah</li> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemertan dan pemertan jalan</li> </ul>

Aspek	Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya)	Kebutuhan Peningkatan	Konsep Peningkatan	Strategi Peningkatan
Bangunan Hunian	<ul style="list-style-type: none"> <li>35,07% tata bangunan tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi</li> <li>Status lahan bukan hak milik</li> <li>Terdapat bangunan hunian yang terletak diatas air</li> <li>Penduduk pendatang yang menempati sempadan sungai</li> <li>KDB sangat tinggi</li> <li>4,98% hunian tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan teratur</li> <li>Penyediaan rumah yang layak dan sesuai dengan standar teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemugaran pada kawasan permukiman kumuh</li> <li>Peremajaan permukiman di pinggir sungai</li> <li>Konsolidasi lahan</li> <li>Penyehatan Lingkungan Permukiman secara komprehensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan bangunan pinggir sungai</li> <li>Panataan bangunan yang berada di atas air laut</li> <li>Pelestarian ekosistem sungai</li> <li>Pelestarian ekosistem pesisir</li> </ul>
Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>37% tidak memiliki akses jalan</li> <li>Lebar jalan kurang dari 1,5 m</li> <li>Konstruksi jalan banyak yang rusak</li> <li>Masih terdapat perkerasan papan dan tanah</li> <li>Belum ada pengaman jalan di kawasan permukiman di atas air laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permukiman terlayani akses jalan lingkungan yang terhubung ke jalan kota</li> <li>Jalan lingkungan sesuai standar kelayakan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas jalan lingkungan</li> <li>Pengelolaan pasca pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan akses jalan lingkungan dan terkoneksi dengan</li> <li>Pemeliharaan jalan lingkungan</li> <li>Peningkatan perkerasan jalan di kawasan permukiman</li> <li>Penambahan fasilitas pelengkap jalan seperti trotoar dan pengaman jalan di permukiman atas air</li> </ul>
Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% kawasan permukiman terjadi genangan banjir</li> <li>Kualitas drainase buruk, tersumbat oleh sampah</li> <li>Tidak terkoneksi dengan drainase kota</li> <li>Terdapat bangunan di atas drainase</li> <li>Terdapat sedimentasi pada saluran drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permukiman bebas genangan</li> <li>Drainase bersih dan dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas drainase</li> <li>Pengendalian ancaman banjir yang diikuti dengan penataan sistem drainase kawasan permukiman kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemugaran bangunan di atas drainase</li> <li>Normalisasi</li> <li>Pemeliharaan drainase</li> <li>Pengendalian banjir kawasan permukiman kumuh</li> <li>Pembuatan talud pada muara sungai/kali mati di permukiman atas air</li> <li>Pembuatan plat beton untuk mencegah terjadinya luapan air</li> </ul>

Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Semanggi Tahun 2016-2020

**Tabel 4.5 Rancangan Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman di Kelurahan Semanggi**

Aspek	Permasalahan Permukiman (hasil Pemetaan Swadaya)	Kebutuhan Peningkatan	Konsep Peningkatan	Strategi Peningkatan
Bangunan Hunian	<ul style="list-style-type: none"> <li>35,07% tata bangunan tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi</li> <li>Status lahan bukan hak milik</li> <li>Terdapat bangunan hunian yang terletak diatas air</li> <li>Penduduk pendatang yang menempati sempadan sungai</li> <li>KDB sangat tinggi</li> <li>4,98% hunian tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan teratur</li> <li>Penyediaan rumah yang layak dan sesuai dengan standar teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemugaran pada kawasan permukiman kumuh</li> <li>Peremajaan permukiman di pinggir sungai</li> <li>Konsolidasi lahan</li> <li>Penyehatan Lingkungan Permukiman secara komprehensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan bangunan pinggir sungai</li> <li>Panataan bangunan yang berada di atas air laut</li> <li>Pelestarian ekosistem sungai</li> <li>Pelestarian ekosistem pesisir</li> </ul>
Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>37% tidak memiliki akses jalan</li> <li>Lebar jalan kurang dari 1,5 m</li> <li>Konstruksi jalan banyak yang rusak</li> <li>Masih terdapat perkerasan papan dan tanah</li> <li>Belum ada pengaman jalan di kawasan permukiman di atas air laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permukiman terlayani akses jalan lingkungan yang terhubung ke jalan kota</li> <li>Jalan lingkungan sesuai standar kelayakan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas jalan lingkungan</li> <li>Pengelolaan pasca pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan akses jalan lingkungan dan terkoneksi dengan</li> <li>Pemeliharaan jalan lingkungan</li> <li>Peningkatan perkerasan jalan di kawasan permukiman</li> <li>Penambahan fasilitas pelengkap jalan seperti trotoar dan pengaman jalan di permukiman atas air</li> </ul>
Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% kawasan permukiman terjadi genangan banjir</li> <li>Kualitas drainase buruk, tersumbat oleh sampah</li> <li>Tidak terkoneksi dengan drainase kota</li> <li>Terdapat bangunan di atas drainase</li> <li>Terdapat sedimentasi pada saluran drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permukiman bebas genangan</li> <li>Drainase bersih dan dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas drainase</li> <li>Pengendalian ancaman banjir yang diikuti dengan penataan sistem drainase kawasan permukiman kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemugaran bangunan di atas drainase</li> <li>Normalisasi</li> <li>Pemeliharaan drainase</li> <li>Pengendalian banjir kawasan permukiman kumuh</li> <li>Pembuatan talud pada muara sungai/kali mati di permukiman atas air</li> <li>Pembuatan plat beton untuk mencegah terjadinya luapan air</li> </ul>

Jaringan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 % belum terlayani jaringan listrik</li> <li>• Belum memadainya penerangan jalan di lingkungan permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh rumah tangga terlayani listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas jaringan listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan jumlah sambungan listrik PLN</li> <li>• Penambahan penerangan jalan</li> </ul>
Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Kurangnya ruang terbuka publik</li> <li>• Minimnya sarana pengembangan ekonomi lokal</li> <li>• Kurangnya modal untuk pengembangan usaha rumah tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai</li> <li>• Tersedianya ruang terbuka publik</li> <li>• Sarana pengembangan ekonomi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Pemugaran untuk penyediaan ruang publik</li> <li>• Peningkatan sarana pengembangan ekonomi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana kelompok belajar PAUD</li> <li>• Pengembangan wisata kuliner dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata cagar budaya</li> <li>• Pengembangan modal usaha rumah tangga melalui KSM</li> </ul>
Pelayanan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.18% belum terlayani air minum</li> <li>• Kualitas air bersih belum sesuai syarat kelayakan</li> <li>• Jaringan pipa PDAM kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman terlayani air minum</li> <li>• Air minum sesuai dengan standar kelayakan air minum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan air minum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jumlah sambungan pipa PDAM</li> <li>• Penyediaan sumber air baku</li> </ul>
Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.67% tidak memiliki jamban sesuai standar teknis</li> <li>• Sistem SPAL belum memadai</li> <li>• Masih banyak jamban yang tidak memiliki septictank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem SPAL memadai</li> <li>• Rumah tangga memiliki MCK sesuai standar teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas MCK</li> <li>• Peningkatan system SPAL</li> <li>• Pengelolaan pasca peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas sarana MCK</li> <li>• Penyediaan septictank komunal</li> <li>• Pemeliharaan MCK</li> </ul>
Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76.47% sampah tidak terangkut</li> <li>• Sampah kiriman dari luar kawasan</li> <li>• Sampah yang berada di bawah rumah/genangan air</li> <li>• Setiap musim hujan kawasan dipenuhi oleh sampah kiriman</li> <li>• Tidak ada TPS sehingga sampah berserakan di mana-mana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampah terangkut ke TPA minimal 2 x seminggu</li> <li>• Tersedia TPS</li> <li>• Sampah dikelola secara produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana persampahan</li> <li>• Pengelolaan pasca peningkatan</li> <li>• Penyehatan Lingkungan Permukiman secara komprehensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana angkutan sampah</li> <li>• Penyediaan tong sampah yang berada di perumahan</li> <li>• Penyediaan dan pengelolaan TPST-3R</li> <li>• Penyediaan Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat</li> </ul>
Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% tidak memiliki proteksi kebakaran</li> <li>• Jalan sempit, tidak dapat diakses mobil pemadam kebakaran</li> <li>• Tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana dan prasarana proteksi kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran</li> <li>• Peningkatan kualitas jalan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan hidran air di lingkungan perumahan yang tidak dapat diakses mobil pemadam</li> </ul>

Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Semanggi 2016-2010

### c. Tahap Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi yaitu tahap nyata penerapan segala rencana proses pelaksanaan kebijakan kedalam bentuk realisasi yang sesungguhnya. Pelaksanaan kegiatan KOTAKU di Kelurahan Semanggi meliputi dua kegiatan yaitu sebagai berikut:

#### 1) Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan

*commit to user*



Kegiatan infrastruktur yang dimaksud adalah kegiatan infrastruktur yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Implementasi kegiatan infrastruktur skala lingkungan di Kelurahan Semanggi banyak difokuskan di RW 23 dan RW 07, wilayah ini merupakan wilayah yang pada tahun 2018 dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wilayah percontohan nasional dalam penanganan permukiman kumuh.

Wilayah permukiman kumuh di RW 07 terdapat dua puluh (20) kepala keluarga yang menempati rumah di atas saluran air. Hal ini menyebabkan setiap musim hujan air yang seharusnya dipompa masuk ke sungai tidak bisa dialirkan karena saluran air diduduki rumah sehingga tidak bisa dibersihkan dan dilebarkan, akibatnya wilayah tersebut sering terjadi banjir. Seperti yang disampaikan oleh Asisten Kelembagaan dan Kolaborasi KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Kawasan yang pertama diintervensi itu RW 07, mereka ada 18 atau 20 KK yang mendirikan rumah di atas saluran air dan saluran air itu sebenarnya kan kumpulan air dari sebelah blok selatan, air mau naik ke sungai karena sebenarnya Solo itu datarannya lebih rendah dari sungai, itu namanya saluran sabuk ya. Seharusnya kan airnya dipompa masuk ke sungai, tetapi karena saluran airnya diduduki rumah, kan tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dilebarkan, dan itu mengakibatkan banjir sepanjang tahun.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Lurah Semanggi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau untuk yang paket Semanggi I di RW 07 itu ada 18 KK, nah kemudian masih ada daerah-daerah kumuh di sekitarnya yang nempel-nempel di tanah BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) tanah negara itu juga. Selain illegal, itu juga bikin banjir.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Sementara untuk wilayah di RW 23 merupakan wilayah dengan permasalahan lingkungan paling berat di antara kawasan kumuh lainnya di Kota Surakarta. Permasalahan-permasalahan yang ada antara lain sistem drainase yang buruk karena di atasnya terdapat bangunan, banyak rumah

tak layak huni (RTLH), dan tingginya angka buang air besar sembarangan (BABS). Hal ini diungkapkan oleh Asisten Kelembagaan dan Kolaborasi KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Untuk yang di Semanggi memang tanah kota yang diduduki liar dan tanahnya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Nah nanti ceritanya yang RW 23 ada 56 rumah, mereka menduduki memanjang di tepi sungai. Kondisi sekarang sedang rata dengan tanah, itu juga sama dia menghabiskan saluran air yang sabuk sebelah timur.”  
(Wawancara 9 Oktober 2020)

Pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan permukiman di RW 07 adalah pavingisasi, pembangunan pedestrian dan taman, serta perbaikan drainase. Untuk sementara, warga dipindahkan ke rumah hunian sementara (hunlara) selama perbaikan drainase. Hal ini disampaikan oleh Koordinator KOTAKU Kota Surakarta sebagai berikut:

“Di sana RW 07, itu ada drainase besar, atasnya pedestrian paving warna warni, ada taman, lampu-lampu hias, lampu kota. Kemarin kita fokus pembangunannya hanya di drainase dan mengangkat pedestrian, tetapi kalau hanya itu saja tetap belum. Kondisinya masih kumuh. Maka tadi program keroyokan tadi masuk. Satu, dari PDAM karena di atas drainase itu ada warga masyarakat, maka otomatis kita pindah, itu yang namanya relokasi. Karena apa? Dia direlokasi dan tidak akan kembali ke situ. Tapi konsekuensi relokasi, pemerintah membuat hunian sementara. Hunian yang dipakai itu bahannya dari material yang bekas Pasar Klewer di alun-alun itu, dikemas menjadi rumah.”  
(Wawancara 9 Oktober 2020)

Sementara di RW 23 penanganan permukiman kumuh yang dilakukan antara lain berupa perbaikan saluran drainase, ruang terbuka hijau (RTH), saluran air bersih master meter, dan penataan koridor jalan. Hal ini disampaikan pula oleh Koordinator KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Selain menyasar hunian, penataan juga bakal memperbaiki sabuk Sungai Bengawan Solo, ruang terbuka hijau (RTH), saluran air bersih master meter, dan penataan koridor jalan. Proses pembangunan hunian tinggal menunggu pengerjaan.”



Dana kegiatan infrastruktur skala lingkungan diperoleh dari APBN dalam bentuk Bantuan Dana Investasi (BDI) yang berubah nama menjadi Bantuan Langsung Masyarakat lalu berubah lagi menjadi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), APBD, CSR, APBDDesa, dan swadaya masyarakat.

**Tabel 4.6 Kegiatan Bantuan Dana Investasi Kelurahan Semanggi Tahun 2018**

Lokasi	Kegiatan	L	P	Unit	Harga
RT004-RT006	Drainase Lingkungan	0,4	208,00		149.760.000
RT001-RW005	Jalan Lapen (Lapisan Penerasi)	3	417,00		190.152.000
RT001-RW005	Drainase Ligkungan	0,4	417,00		300.240.000
RT004-RW003	Drainase Ligkungan	0,4	157,00		113.040.000
RT008-RW004	Drainase Ligkungan	0,3	160,00		81.600.000
RT008-RW004	Jalan Paving Block	2	85,00		25.840.000
RT008-RW012	MCK Mandi + Cuci + Kakus		1,00	1	77.216.000
RT008-RW012	Jalan Paving Block	2	188,00		57.152.000
Total					995.000.000

Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Semanggi Tahun 2016-2020

**Tabel 4.7 Kegiatan Bantuan Dana Investasi Kelurahan Semanggi Tahun 2019**

Nama KSM	Jenis detail sub komponen	Lokasi RT/ RW Terlayani kriteria Kekumuhan	Volume	Satuan (M/Unit/ M2)	BPM
Tri Dhesu	Drainase Lingkungan	RT005-RW010	86	meter	40.800.000
Tri Dhesu	Jalan Paving Block	RT005-RW010	43,5	meter	19.800.000
Tri Dhesu	Drainase Lingkungan	RT006-RW010	90	meter	42.700.000
Tri Dhesu	Jalan Paving Block	RT006-RW010	45	meter	19.900.000
Tri Dhesu	Drainase Lingkungan	RT001-RW013	180,4	meter	776.200.000
Tri Dhesu	Jalan Paving Block	RT001-RW013	190	meter	740.400.000
Tri Dhesu	Drainase Lingkungan	RT004-RW013	413	meter	213.500.000
Tri Dhesu	Jalan Paving Block	RT004-RW013	413	meter	128.900.000
Tri Dhesu	Drainase Lingkungan	RT005-RW002	331	meter	228.700.000
Total BPM untuk KSM Tri Dhesu					1.000.000.000
Dwi Karso	IPAL Komunal	RT003-RW002	1	unit	840.200.000
Dwi Karso	Jalan Paving Block	RT004-RW003	270	meter	104.800.000
Total BPM untuk KSM Dwi Karso					940.000.000
Biaya Operasional LKM					10.000.000
Total BPM (Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat) Tahun 2019					2.000.000.000

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan BPM 2019

Kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terjadi ketika warga di RW 07 dan RW 23 menolak untuk dipindahkan ke tempat lain karena ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah bahwa benar program KOTAKU hanya akan memindahkan sementara, bukan menggusur. Penyelesaian dari masalah tersebut dilakukan dengan cara komunikasi langsung melalui pertemuan antara warga terdampak dengan Walikota Surakarta. Hal ini disampaikan oleh Asisten Kelembagaan dan Kolaborasi KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Itu yang pertama kali kita intervensi, mereka dipindahkan, rumahnya dibongkar tetapi kan mereka tidak mau dipindahkan begitu saja walaupun mereka benar-benar menduduki saluran air, walaupun rumahnya tidak permanen mereka tetap tidak mau diusir. Itu pertama kali dipindahkan, mereka diajak rembukan, bahkan mereka langsung bertemu dengan Pak Wali untuk pindah dari situ karena mau ditata, kalau tidak ditata bikin banjir semua kawasan. Karena ketika kita pertama kali masuk sosialisasi ke situ mereka tidak percaya, katanya sudah puluhan tahun tidak pernah dikerjakan seperti itu.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Lurah Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Warga dipindahkan sementara. Meyakinkan mereka bahwa pemerintah itu bersungguh-sungguh itu ya juga ga gampang. Karena kan mereka merasa bahwa mereka kan sudah menempati di sini sudah puluhan tahun, tetapi di satu sisi itu kan tanah negara, tanah pemkot. Nah, jadi rasa was-was mereka itu pasti ada merasa wah nanti aku digusur, nanti ada tindakan-tindakan represif aparat dan lain sebagainya, itu kan mereka khawatir di situ. Nanti mau tinggal di mana segala macam, ya kita pelan-pelan yakinkan mereka.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Sementara untuk kegiatan infrastruktur yang lain seperti perbaikan jalan dan drainase, seringkali mendapat protes dari warga di lingkungan yang sedang terjadi pembangunan. Hal ini disampaikan oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi dalam pernyataan berikut:

“Kalau dinamika di masyarakat kan relatif sama ya, karena kendala kegiatan itu kadang ketika kita membangun kegiatan berdampak juga

pada terganggunya aktifitas masyarakat. Kalau ada proses pembangunan pasti ada protes dari masyarakat kegiatannya kok tidak selesai-selesai seperti itu. Ya kita mencoba menjelaskan kalau kegiatan seperti itu kan membutuhkan waktu.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Pernyataan yang sama disampaikan pula oleh Ketua LKM Semanggi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Setiap pembangunan ya pasti ada saja warga yang protes, biasanya kita temui langsung orang yang protes. Kita tanya keluhannya apa, lalu kita coba jelaskan. Ini kan juga untuk kebaikan bersama begitu.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Unit Pengelola Lingkungan LKM Semanggi juga memberikan pernyataan serupa sebagai berikut:

“Kalau ada protes kita lakukan mediasi dengan warga yang protes tersebut. Kita sampaikan bahwa jika ada hak pribadi dan hak umum mana yang harus didahulukan. Biasanya warga yang protes itu malah warga yang setiap ada diskusi warga, mereka tidak datang, tapi pas pembangunan mereka protes.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Kendala lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan infrastruktur adalah keterlambatan material yang akan digunakan untuk pembangunan dan adanya kegiatan pembangunan fisik lainnya sehingga pembangunan fisik yang lain harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Ketua LKM Semanggi dalam pernyataan berikut:

“Paling kalau mulai ada pembangunan itu satu dua kali materialnya datang terlambat, seperti waktu pembangunan drainase di RT 01 RW 13 itu ngirim material uditch-nya terlambat. Ada juga di RT 05 RW 02 mau dibangun drainase tapi di situ sedang ada pengerjaan IPAL.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Kendala lain yang dihadapi oleh pelaksana adalah, KOTAKU tidak memiliki kewenangan dalam penataan kawasan kumuh di wilayah rel kereta api. Sehingga wilayah tersebut terhitung sebagai wilayah kumuh dalam SK Walikota, tetapi KOTAKU tidak bisa melakukan penataan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU dalam kutipan berikut ini:

“Illegal itu kan bisa tanah di bantaran sungai, kalau di Solo ini ya, tanah di bantaran sungai, tanah milik Pemkot yang diduduki, mungkin tanah negara bebas, dan tanah milik PJ KA kereta api. Cuma kita yang kereta api tidak bisa bergerak sama sekali karena mereka aturannya berbeda sama sekali, karena mereka itu bisa sewa. Tapi dengan perjanjian mereka bisa digusur ketika akan dipakai, sehingga itu tidak bisa diapa-apakan, kita tidak bisa intervensi. Kalau yang bantaran sungai itu kan mereka nekat, tidak ada sewa, tidak ada izin, liar kan, tanah milik kota juga sama liar, cuma mereka kan lama di situ jadi tidak bisa diusir begitu saja. Untuk yang di kereta api lebih gimana ya karena ada perjanjiannya mereka di situ, jadi memang agak sulit untuk kita mendampingi penataannya.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Kasubid Infrastruktur Kota Bappeda Kota Surakarta berikut ini:

“Banyak kendala terutama yang masuk di bantaran kereta api dan daerah cagar budaya sehingga kita tidak bisa intervensi. Kalau untuk KOTAKU sendiri itu yang susah tanah PT KAI kita tidak bisa bantu.” (Wawancara 12 Oktober 2020)

Kendala-kendala dalam pelaksanaan infrastruktur tersebut diakui oleh Koordinator KOTAKU Kota Surakarta sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya nol persen kumuh di tahun 2019. Selain itu wilayah kumuh di Semanggi yang sebagian besar di tanah ilegal milik pemerintah kota dan bantaran sungai, membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam penanganan permasalahan kumuh di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“Itu karena satu tipologi kawasan kumuh itu 90 persen ada di wilayah squatter, kawasan kumuh yang ada di tanah ilegal, seperti bantaran PSDA ada di tanahnya pemerintah kota, ada di bantaran tanah PT KAI. Itu tanah bukan milik warga, mereka membangun rumah pasti seadanya karena bukan tanah mereka dan mereka juga tidak punya uang untuk membangun hunian layak. Itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sampai warga masyarakat betul-betul menikmati kehadiran negara dan kemakmuran mereka bisa dirasakan melalui kepastian permukiman bagi mereka. Berarti mereka harus ditata dan diberi kepastian permukiman, itu yang berat. Maka target 2019 untuk mewujudkan nol persen kumuh sulit tercapai, 2024 saja itu nanti masih menjadi tanda tanya selesai atau tidak.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pernyataan tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Asisten Kelembagaan dan Kolaborasi KOTAKU Kota Surakarta berikut ini:

“Sebenarnya targetnya harusnya sudah selesai di 2019 kemarin, tetapi kan memang secara nasional belum selesai. Berarti itu masuk lagi ke RPJMN yang sekarang, berarti sampai 2024. Penyebabnya ya itu selain ketidakpercayaan masyarakat dan regulasi yang harus ditempuh itu banyak. Dari illegal menjadi legal itu ngomongnya mudah tetapi prosesnya melelahkan banget.” (Wawancara 9 Oktober 2020)  
Dokumentasi kegiatan infrastruktur disajikan dalam lampiran 2.

2) Kegiatan Ekonomi dan Sosial

Kegiatan ekonomi program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dilakukan dengan pengadaan pinjaman bagi masyarakat. Pelaksana yang mengatur pinjaman adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Semanggi. Sementara untuk kegiatan sosial yang dilakukan di Kelurahan Semanggi antara lain kegiatan peningkatan kapasitas seperti misalnya pelatihan/*on the job training* kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat, dan sosialisasi menerus. Selain itu kegiatan sosial program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Semanggi antara lain: pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat, pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kegiatan pemasaran program permukiman. Dokumentasi kegiatan ekonomi dan sosial disajikan dalam lampiran 2.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU dalam kutipan berikut ini:

“Untuk kegiatan sosial kita ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial seperti santunan, beasiswa itu ada. Kalau untuk yang ekonomidulu kan dana bantuan itu boleh digulirkan jadi kayak unit simpan pinjam seperti itu.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan di Kelurahan Semanggi mengalami beberapa kendala seperti: warga yang menolak dipindahkan ke hunian sementara, protes dari



warga karena terganggu dengan aktivitas pembangunan fisik, keterlambatan material yang digunakan untuk perbaikan atau pengadaan infrastruktur, serta KOTAKU yang tidak memiliki kewenangan dalam penataan wilayah kumuh di area rel kereta api.

#### **E. Evaluasi Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi**

Evaluasi implementasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yaitu kepatuhan (*compliance*). *Compliance* merupakan tingkat kepatuhan implementor dalam bertindak, apakah sesuai dengan ketentuan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan. Dalam keberhasilan implementasi program KOTAKU di Kelurahan Semanggi diukur melalui kepatuhan (*compliance*) pelaksana program di tingkat kelurahan. Penelitian ini hanya melihat dari pendekatan kepatuhan karena pendekatan kepatuhan sudah bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi.

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa yang merupakan turunan dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berdasarkan proses implementasi program KOTAKU di Kelurahan Semanggi yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaksana program KOTAKU belum sepenuhnya patuh terhadap petunjuk pelaksanaan program KOTAKU yang ada di tingkat kelurahan. Berikut ini merupakan tabel evaluasi implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi ditinjau dari aspek kepatuhan:

**Tabel 4.8 Evaluasi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  
di Kelurahan Semanggi**

No	Tahapan	Aktivitas	Pelaksanaan	Evaluasi
1	Tahap Pengorganisasian	Penentuan sumber daya manusia	<p>Penentuan sumber daya manusia diawali dengan persiapan dengan membangun kapasitas dan peran melalui sosialisasi. Penggalangan anggota LKM dilakukan melalui penunjukan dan dipilih melalui pemilu. Pemilihan anggota TIPP dilakukan dengan penunjukan dan disepakati dengan rembug warga. Sedangkan pendamping pelaksanaan program/fasilitator kelurahan merupakan hasil rekrutan satker PKP provinsi.</p>	<p>Pelaksanaan penentuan sumber daya manusia yang menjadi anggota LKM dan TIPP belum mematuhi petunjuk pelaksanaan program KOTAKU di tingkat kelurahan yang seharusnya didasarkan pada keahlian, bukan hanya nilai-nilai luhur seperti kejujuran. Hal ini menjadi kendala karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian sehingga sulit mencari pengganti anggota LKM dan TIPP.</p>
		Penentuan anggaran, sarana, dan prasarana	<p>Anggara yang digunakan dalam pelaksanaan program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), lembaga mitra pemerintah (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>), serta swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.</p>	<p>Penentuan anggaran yang digunakan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program KOTAKU yaitu berdasarkan lingkungan yang masuk ke dalam prioritas yang dimuat dalam SK Walikota Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016. Pengadaan sarana dan prasana mengalami kendala dalam</p>

			Sarana dan prasarana diperoleh dari dinas-dinas yang ditunjuk oleh walikota untuk membantu dalam menyukseskan program KOTAKU.	pengadaan lahan yang akan diberikan untuk warga yang terdampak relokasi.
2	Tahap Interpretasi	Sosialisasi	Sosialisasi awal dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dan dihadiri oleh pemerintah Kelurahan Semanggi dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dimaksudkan agar pemerintah desa dan LKM selaku pelaksana program KOTAKU memiliki pemahaman yang sama dan arah tujuan yang sama dengan pemerintah daerah. Selanjutnya LKM melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan program.	Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program, akan tetapi harus dilakukan berkali-kali sehingga membutuhkan waktu yang lama. Pelaksanaan sosialisasi mengalami kendala berupa sulitnya mengubah pola pikir masyarakat dan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
		Refleksi Perkara Kritis (RPK)	Dilakukan bersama dengan sosialisasi awal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara <i>rembug</i> warga dan sedikit <i>focus group discussion</i> (FGD) oleh Lurah Semanggi, LKM	Pelaksanaan tidak sepenuhnya mematuhi petunjuk pelaksanaan karena warga terdampak merupakan warga miskin dengan jenjang pendidikan rendah, maka FGD

			Semanggi, dan TIPP.	tidak dilakukan dengan maksimal dan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.
		Pemetaan swadaya	Pemetaan swadaya meliputi dua kegiatan yaitu <i>mapping</i> permasalahan dan konsolidasi data yang ditujukan agar target yang akan dicapai di tingkat kelurahan sesuai dengan target pemerintah kota dan sasaran target antara KOTAKU dan pemerintah kota tidak mengalami tumpang tindih.	Pelaksanaan pemetaan swadaya telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan.
		Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)	RPLP Kelurahan Semanggi disusun oleh TIPP bersama dengan LKM Semanggi dan Lurah Semanggi yang didampingi oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi dan Tim Koordinator KOTAKU serta pemerintah daerah melalui perwakilan Disperum KPP dengan cara <i>rembug</i> dan FGD. Proses pelaksanaan dimulai dari penyusunan dokumen, pembuatan <i>road map</i> , sosialisasi	Penyusunan RPLP dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan. Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sebab sejak persiapan dokumen hingga penyusunan draft selalu didampingi oleh fasilitator, Tim Korkot, dan Disperum KPP.

			rencana teknis di lingkungan prioritas, dan penyusunan draft RPLP.	
	Tahap Pelaksanaan	Kegiatan infrastruktur skala lingkungan	Pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang dilakukan antara lain: pavingisasi, pembangunan pedestrian dan taman, perbaikan drainase, ruang terbuka hijau (RTH), saluran air bersih master meter, dan penataan koridor jalan. Pelaksanaan kegiatan banyak dilakukan di RW 07 dan RW 23.	Kegiatan infrastruktur skala lingkungan dilaksanakan dengan mematuhi petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengalami kendala berupa warga yang menolak dipindahkan ke hunian sementara, protes dari warga karena terganggu dengan aktivitas pembangunan fisik, keterlambatan material yang digunakan untuk perbaikan atau pengadaan infrastruktur, serta KOTAKU yang tidak memiliki kewenangan dalam penataan wilayah kumuh di area rel kereta api.
		Kegiatan ekonomi dan sosial	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah simpan pinjam, sosialisasi, dan pelatihan-pelatihan.	Dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program KOTAKU sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Semanggi.

Sumber: data diolah



Untuk melihat kepatuhan implementor dalam pelaksanaan program KOTAKU, dapat pula dilihat bagaimana perilaku implementor dan bagaimana implementor memahami program dan menerjemahkannya menjadi informasi yang dapat dipahami oleh sasaran program.

Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dilaksanakan oleh Tim Inti Perencana Partisipatif (TIPP), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Semanggi, dan Lurah Semanggi yang didampingi oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi serta Tim Koordinator KOTAKU Kota Surakarta. Setiap implementor memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua implementor mengetahui dan memahami isi dari program KOTAKU. Hal ini dibuktikan dengan para implementor memiliki pemahaman yang sama terkait dengan tujuan program KOTAKU, pernyataan mengenai tujuan program yang dipahami oleh implementor dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.9 Hasil Wawancara Informan**

No	Informan	Hasil wawancara
1	Lurah Semanggi	“Apapun kegiatan yang dilakukan terkait program itu untuk member kehidupan yang layak, yang sesuai dengan program pengentasan kawasan kumuh 100 – 0 – 100.” (Wawancara 7 Oktober 2020)
2	Koordinator Program KOTAKU	“Kementerian PU melalui target di RPJMN 2015-2019 dan dilanjutkan lagi 2024 itu berkonsentrasi terkait dengan intervensi fasilitasi infrastruktur pelayanan dasar, salah satunya melalui program KOTAKU untuk membawa dan mewujudkan target 100 – 0 – 100. Program KOTAKU hadir untuk melakukan intervensi dengan platform kolaborasi agar target 100 – 0 – 100 dapat terealisasi.” (Wawancara 9 Oktober 2020)
3	Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU	“Tujuan KOTAKU kita kan Kota Tanpa Kumuh, jadi kita memang mendukung

		pencapaian target nasional 100 – 0 – 100, 100% air bersih, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi. Nah kita sebenarnya support di 0% kumuh itu.” (Wawancara 9 Oktober 2020)
4	LKM Semanggi	“Pada dasarnya tujuan program adalah untuk membantu mendukung target 100 – 0 – 100 yaitu 100% air bersih, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

*Sumber: data diolah*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksana program KOTAKU di Kelurahan Semanggi memahami bahwa keberadaan program adalah untuk mendukung gerakan 100 – 0 – 100 seperti yang tertuang dalam sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019.

Selain memahami tujuan dari adanya program KOTAKU, implementor juga mengetahui keberadaan pedoman pelaksanaan program KOTAKU ketika peneliti menanyakan terkait tentang ada atau tidaknya pedoman pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Asisten Kelembagaan dan Kolaborasi KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Ya pedoman konsep secara umum dan struktur organisasi ada, kewenangannya apa juga ada, itu bisa diunduh di Web KOTAKU ada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016. Kalau di tingkat kelurahan ada pedoman pelaksanaan itu juga bisa diunduh di web kalau mau.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Lurah Semanggi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Ada, pasti ada pedoman pelaksanaannya. Apalagi itu kan informasinya dana dari LON dari luar negeri, jadi kan lebih *njlimet* dan ruwet, harus bikin larapnya, bikin perencanaannya.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Ketua LKM Semanggi memberikan pernyataan yang sama terkait dengan keberadaan pedoman pelaksanaan program, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kalau di tingkat kota kita mengacu ke surat edaran dari Kementerian PUPR Nomor: 40/SE/DC/2016. Di kelurahan, kita pakai pedoman pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan, itu turunan dari surat edaran kementerian.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Meskipun implementor tidak menyebutkan secara pasti nomor surat yang menjadi pedoman umum pelaksanaan program, tetapi implementor mengetahui bahwa terdapat pedoman pelaksanaan program di tingkat kelurahan sebagai petunjuk dalam melaksanakan program KOTAKU. Pemahaman implementor tentang keberadaan pedoman pelaksanaan akan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi saat pelaksanaan program.

Pemahaman implementor terkait dengan program KOTAKU dapat dilihat pula dari bagaimana kemampuan implementor menerjemahkan program ke dalam bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat dengan rata-rata tingkat pendidikan rendah yang menjadi sasaran dari program KOTAKU. Cara implementor menjelaskan mengenai program kepada warga terdampak, membuat warga yang awal mula tidak percaya dan menolak adanya program berubah menjadi secara sukarela ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini tercermin dari sosialisasi dan pendekatan informal yang berkali-kali dilakukan oleh implementor kepada warga Kelurahan Semanggi. Pernyataan ini diungkapkan oleh Lurah Semanggi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Mereka itu ada isu sedikit saja sudah sensitif, ada petugas datang mereka langsung ikuti lalu dihalangi. Ya terpaksa saya juga datang lalu bilang untuk minggir dan percaya ke pemerintah. Kalau saya kan, separuh saya masuk ke pemerintah tapi separuh juga saya kan masuk ke *link-link* mereka, masuk ke jiwa-jiwa mereka. Saya datangi berkali-kali, ikut nongkrong sama mereka. Sambil saya jelaskan tujuan program tuh seperti apa sampai akhirnya mereka beneran menerima.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Koordinator KOTAKU Kota Surakarta berikut ini:

“Saya pendekatan ke warga bisa sampai satu tahun. Sampai ke proses perencanaan itu paling tidak satu tahun. Kuncinya itu sering ngobrol dengan warga, tidak harus KOTAKU yang diobrolkan terus, apa saja keluhan warga kita dengarkan sambil sedikit-sedikit konsep program kita internalisasikan. Ada keluhan apa, kita jelaskan programnya nanti seperti apa, tidak akan digusur seperti itu. Akhirnya ya warga paham setelah didekati berkali-kali.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

#### **F. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi**

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dilihat dari dua indikator berdasarkan teori Implementasi George C. Edward III, yaitu sebagai berikut:

##### **1) Komunikasi**

Komunikasi merupakan hal yang penting karena menjadi penghubung antara pelaksana dengan pelaksana maupun antara pelaksana dengan warga Kelurahan Semanggi yang menjadi sasaran program KOTAKU. Komunikasi yang baik akan mempermudah kelompok sasaran kebijakan untuk memahami isi, tujuan, dan manfaat dari adanya kebijakan. Selain itu, adanya komunikasi yang terjalin dapat mempengaruhi keputusan kelompok sasaran dalam penerimaan terhadap keberadaan program.

Komunikasi dalam proses pelaksanaan program KOTAKU dilakukan dengan komunikasi formal dan informal. Hal ini disampaikan oleh Koordinator KOTAKU Kota Surakarta ketika terdapat pertanyaan mengenai cara berkomunikasi dengan masyarakat dalam pernyataan berikut:

“Komunikasi dilakukan secara formal dan informal, yang paling penting adalah sosialisasi dan komunikasi informal.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Selanjutnya Koordinator KOTAKU Kota Surakarta mengungkapkan bahwa komunikasi informal dilakukan dengan terjun langsung menemui masyarakat, seperti penjelasan yang diberikan berikut ini:

“Saya sekali waktu mendelegasikan, memerintahkan dan menugaskan kepada teman-teman dari KOTAKU harus sering bermain dan menemui masyarakat. Untuk apa? Ngobrol, dan tidak harus KOTAKU yang diobrolkan, yang pertama itu. Kita harus pro aktif dan supel. Itu kunci suksesnya di situ, nah sambil sedikit-sedikit konsep program diinternalisasikan. Jadi, ya informal itu yang penting.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pentingnya melakukan komunikasi informal dalam sosialisasi program KOTAKU disadari pula oleh Lurah Semanggi seperti yang disampaikan dalam pernyataan berikut:

“Pendekatan informal penting dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami program dengan bahasa sehari-hari, karena tidak semua masyarakat bisa dengan mudah menangkap apa yang disampaikan di sosialisasi dengan bahasa formal, selain itu juga kita pelan-pelan bisa mendapatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Sementara komunikasi formal dilakukan melalui sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD). Sosialisasi tidak hanya dilakukan sekali tetapi berkali-kali hingga masyarakat memahami dengan jelas terkait isi dan tujuan program KOTAKU. Sementara FGD dilakukan dengan mengumpulkan beberapa warga Kelurahan Semanggi yang dianggap mengetahui dengan pasti terkait dengan kondisi dan keadaan di Kelurahan Semanggi. Hal ini disampaikan oleh Fasilitator Kelurahan Semanggi berikut ini:

“Untuk sosialisasi kita lakukan berkali-kali sampai tujuan kita untuk menginformasikan tentang program KOTAKU dipahami dengan sungguh-sungguh oleh warga. Kalau melakukan FGD, kita lebih ke tim perumus. Kita mengumpulkan orang-orang yang tahu Semanggi seperti apa. Paling tidak walaupun hanya sedikit tetapi bisa mewakili Kelurahan Semanggi. Karena kan tidak mungkin setiap saat mengumpulkan semua warga untuk sosialisasi.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Komunikasi dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dapat dikatakan sudah baik. Hal ini tercermin dari adanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran sebelum program dilaksanakan. Implementor melakukan pendekatan tidak hanya ketika mengadakan sosialisasi, tetapi juga berkali-kali ikut berkumpul



bersama warga dalam pertemuan-pertemuan informal. Hal ini disampaikan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut:

“Pendekatan dilakukan terus-menerus, kalau kita kan kegiatan infrastruktur berbasis pemberdayaan, sehingga memang kita pendekatan langsung kepada masyarakat, basis gitu ya langsung di tingkat RT, kelurahan. Pokoknya Pak Cahyo selaku koordinator selalu meminta tim terus *srawung* dengan masyarakat, terutama yang terdampak.”  
(Wawancara 9 Oktober 2020)

Hal ini disampaikan pula oleh Koordinator KOTAKU dalam pernyataan berikut ini:

“Lama, saya pendekatan ke warga bisa sampai satu tahun. Sampai ke proses perencanaan itu paling tidak satu tahun. Dan kita harus punya komitmen dan kepedulian untuk berpihak kepada orang kecil. Kita harus menunjuk bukan kepada masyarakat secara umum tetapi langsung orang kecil.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Para pelaksana program dalam menyampaikan isi dan tujuan program menggunakan bahasa sehari-hari sehingga kelompok sasaran dapat memahami penjelasan dari implementor dengan baik. Cara ini efektif untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara implementor dan kelompok sasaran. Hal ini disampaikan oleh Koordinator KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut:

“Pendampingan-pendampingan yang kita lakukan selalu menggunakan bahasa yang sederhana, tidak muluk-muluk karena sama masyarakat.”  
(Wawancara 9 Oktober 2020)

Selain komunikasi di antara implementor dengan kelompok sasaran, komunikasi yang terjalin di antara implementor dengan implementor lain juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan program. Komunikasi selalu dilakukan secara berkala setiap akan diadakan kegiatan. Tim Korkot selalu menghubungi Lurah Semanggi atau LKM secara langsung untuk berkomunikasi terkait pelaksanaan program. Hal ini disampaikan oleh Ketua LKM Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Koordinasi dengan Tim Korkot selalu bagus itu, kalau ada apa-apa pasti menghubungi, kalau ada masalah apa pasti juga menghubungi apalagi yang berkaitan dengan warga, karena warga ini kan sensitif sekali. Mereka selalu menghubungi saya atau ke LKM langsung, kadang-kadang lewat fasilitator juga.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Kendala-kendala yang ada dapat diselesaikan dengan komunikasi yang dilakukan secara masif dengan masyarakat terdampak. Pendekatan yang dilakukan memerlukan waktu yang tidak sebentar sampai akhirnya masyarakat memahami isi dan tujuan program KOTAKU. Pendekatan yang dilakukan oleh implementor KOTAKU adalah dengan sering menemui warga untuk mengobrol di luar sosialisasi formal yang dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Koordinator KOTAKU dalam pernyataan berikut ini:

“Kuncinya itu sering ngobrol dengan warga, tidak harus KOTAKU yang diobrolkan terus, apa saja keluhan warga kita dengarkan sambil sedikit-sedikit konsep program kita internalisasikan. Ada keluhan apa, kita jelaskan programnya nanti seperti apa, tidak akan digusur seperti itu. Akhirnya ya warga paham setelah didekati berkali-kali. (Wawancara 9 Oktober 2020)

Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Lurah Semanggi dalam melakukan pendekatan kepada warga, hal ini disampaikan dalam pernyataan berikut ini:

“Kalau saya kan, separuh saya masuk ke pemerintah tapi separuh juga saya kan masuk ke *link-link* mereka, masuk ke jiwa-jiwa mereka. Saya datang berkali-kali, ikut nongkrong sama mereka. Sambil saya jelaskan tujuan program tuh seperti apa sampai akhirnya mereka beneran menerima.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Adanya komunikasi yang dilakukan secara masif antara implementor program KOTAKU baik secara formal maupun informal diakui warga menjadi salah satu penyebab mereka akhirnya menerima program dan ikut terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini disampaikan warga dalam pernyataan berikut ini:

“Ya awal-awal memang kami tidak percaya kalau programnya tidak ada pengrusuhan, tapi Pak Lurah sama Pak Korkot sering ikut ngobrol sama warga, akhirnya lama-lama paham, Mbak. Dibandingkan kalau kumpulan rapat gitu, lebih *nyantol* kalau ngobrol biasa.” (Wawancara 30 Desember 2020)

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh warga lain yang terdampak program KOTAKU seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“LKM kan orangnya warga sini sendiri, jadi ya kalau ada yang bingung kita tanya langsung. Mau protes juga kan bisa ke LKM, nanti mereka yang memberi penjelasan. Kalau ada sosialisasi juga diajak ikut.” (Wawancara 30 Desember 2020)

## 2) Sumber Daya

Sumberdaya yang digunakan dalam implementasi program KOTAKU di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah semua aktor yang berkepentingan serta ikut terlibat dalam pelaksanaan program. Sedangkan sumber daya finansial adalah besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) untuk membiayai pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi.

Sumber daya manusia yang melaksanakan program di Kelurahan Semanggi terdiri dari Tim Koordinator KOTAKU Kota Surakarta, fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Lurah Semanggi, LKM Semanggi, dan TIPP. Tim koordinator dan fasilitator terdiri dari individu yang direkrut oleh Kementerian PUPR berdasarkan kemampuan (*competency*) dan keahlian (*skill*). Hal ini diungkapkan oleh fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi dalam pernyataan berikut:

“Kalau pendamping, kita direkrut dari Perkim Satker provinsi, satu SPK dengan tim Korkot. Jadi Satker menginformasikan lewat media masa tentang kebutuhan pendamping. Jadi faskel atau pendamping lama maupun baru itu bisa ikut. Kemudian kita mendaftar secara online, ada seleksi administrasi, setelah seleksi administrasi kita melakukan tes online. Baru setelah itu diumumkan yang lolos siapa saja sambil kita menunggu SK penempatan.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Dengan perekrutan tersebut sumber daya manusia yang dihasilkan merupakan sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program KOTAKU. Sementara untuk LKM, dipilih berdasarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran. Setelah dipilih orang-orang yang akan mengisi keanggotaan

LKM, selanjutnya dilakukan pemilihan ketua melalui pemilihan umum. Contoh form hasil pemilihan ketua LKM disajikan dalam lampiran 2. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut:

“Untuk LKM itu orangnya dari warga dengan konsep, kan itu sebenarnya LKM itu bukan seperti ada bendahara, sekretaris gitu tetapi seperti dewan amanah. Mereka dipilih berbasis nilai-nilai luhur, jadi orang baik, orang jujur, orang yang dapat dipercaya, seperti itu.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Sementara untuk TIPP, pemilihan anggota dipilih dengan cara mengusulkan nama-nama yang dianggap mampu mengemban amanah dalam menjalankan peran. Usulan nama tersebut disampaikan dalam *rembug* warga pada saat sosialisasi awal dilaksanakan. Pernyataan Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator KOTAKU ketika menjawab pertanyaan terkait dengan perekrutan TIPP, dalam pernyataan berikut:

“TIPP berasal dari warga masyarakat. Dari masyarakat dilihat dari nilai-nilai dan kepedulian.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Lurah Semanggi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Sistem penunjukan TIPP itu dari rapat kesepakatan warga. Kalau masa baktinya sudah selesai, nanti di RWT dipilih dulu pengurusnya, setelah pengurus terpilih mereka langsung memimpin rapat itu.” (Wawancara 7 Oktober 2020)

Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu warga yang terlibat dalam penunjukan TIPP seperti dalam pernyataan berikut:

“Awal sosialisasi itu ada pemilihan anggota, ya kita pilih dari warga sini siapa yang kira-kira bisa. Setelah dapat nama kita bisa bilang setuju apa tidak.” (Wawancara 30 Desember 2020)

Selain sumber daya manusia, program KOTAKU didukung oleh sumber daya finansial dari APBN, APBD, CSR, dan swadaya masyarakat. Anggaran untuk pelaksanaan program KOTAKU belum pernah menjadi kendala dalam

pelaksanaan program. Hal ini diungkapkan oleh Ketua LKM Semanggi dalam pernyataan berikut ini:

“Dana kegiatan tadi dari APBN, APBD, CSR, swadaya masyarakat juga ikut membantu karena untuk infrastruktur warga kan terkadang mereka ikut iuran. Terus kalau Surakarta itu CSRnya kebetulan murah hati, seperti rumah layak huni itu sebagian besar CSR CSR itu ada perbankan, perusahaan-perusahaan besar kayak percetakan. Jadi lancer-lancar saja selama ini.” (Wawancara 16 Oktober 2020)

Sumber daya lain yang digunakan dalam pelaksanaan program diperoleh dari dinas-dinas yang ditunjuk oleh walikota untuk ikut mendukung pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini disampaikan oleh Kasubid Infrastruktur Kota Bappeda Surakarta dalam pernyataan berikut:

“DPUPR untuk penataan drainase, DLH untuk taman dan ruang terbuka hijaunya, Perkim mereka sebagai *leading sector*, kemudian ada Dinsos dan Dinas Perdagangan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, jadi tidak sekedar ditata terus direlokasi tetapi pembinaannya juga ada, pelatihan-pelatihan dasar juga ada.” (Wawancara 12 Oktober 2020)

Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan Kotaku Kota Surakarta memberikan pernyataan yang serupa terkait dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program, seperti dalam kutipan berikut ini:

“Kita ada dari PDAM membuat sarana MCK dan air bersih, lalu PLN membuat dan mensuplai bogensel komunal yang besarnya 20000 watt. Ada juga dari DLH, dia menanam pohon-pohon besar di lingkungan yang ditata, yang paling besar itu dari Balai Besar. Balai Besar Sungai Bengawan Solo itu satu paket telah berdiri membangun parabet. DPU juga memberikan lampu-lampu untuk penerangan jalan, Terakhir dari Perindustrian, Koperasi, dan Perdagangan itu pemberdayaan usaha-usaha kecil, masyarakat di situ dilatih, dibina, khususnya warga yang di bantaran.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Sumber daya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU terjadi ketika proses pemberian lahan kepada warga. Tanah milik pemerintah kota dan milik Balai Besar Bengawan Solo yang diminta oleh Walikota Surakarta untuk diberikan kepada warga terdampak program penataan kumuh dalam alih hak milik mengalami hambatan dalam proses birokrasinya



sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disampaikan oleh Asisten Kolaborasi dan Kelembagaan KOTAKU Kota Surakarta dalam pernyataan berikut ini:

“Jadi tanah itu proses pelepasan juga dari Balai Besar dan itu yang meminta Pak Wali juga. Itu juga tidak semudah yang kita kira karena kan sampai ke pusat. Jadi itu tanahnya di bawah PSDA Kementerian PU kan, berarti sampai ke kementerian untuk pelepasan asset kemudian masuk ke kementerian keuangan karena mau melepas asset dan ini mungkin prosesnya panjang dan lama, sudah dari tahun 2017 sampai hari ini belum, masih dalam proses tapi boleh dilakukan penataan walaupun mungkin suratnya dalam proses.” (Wawancara 9 Oktober 2020)

Selain birokrasi alih lahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi, keterlambatan material sebagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam kelancaran implementasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua LKM Semanggi dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Seperti yang saya bilang tadi, material datang terlambat padahal kita sudah punya target kapan pembangunan dimulai dan selesai seperti di RT 01 RW 13 sama RT 05 RW 02, tapi karena materialnya belum datang ya pembangunan jadi tertunda menunggu material datang.” (Wawancara 16 Oktober)

**Tabel 4.10 Evaluasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta**

No	Indikator Penilaian	Pelaksanaan	Evaluasi
1	Komunikasi	Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dilaksanakan dengan komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dilakukan melalui sosialisasi dan FGD, sementara sosialisasi informal dilakukan dengan pertemuan-pertemuan	Komunikasi yang terjalin di antara pelaksana program dengan pelaksana program maupun pelaksana program dengan masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik. Kendala-kendala yang terjadi, sebagian dapat diselesaikan dengan komunikasi yang masif. Akan tetapi, pendekatan

		informal seperti pendekatan dengan warga dengan menemui warga secara langsung ketika warga sedang berkumpul.	yang dilakukan memerlukan waktu yang sangat lama sampai akhirnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
2	Sumber Daya	Sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi meliputi sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sumber daya finansial berasal dari APBN, APBD, CSR, dan swadaya masyarakat. Sumber daya manusia yang melaksanakan program KOTAKU di Kelurahan Semanggi adalah Tim Koordinator KOTAKU Kota Surakarta, fasilitator KOTAKU Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Lurah Semanggi, LKM Semanggi, dan TIPP. Sementara sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan program diperoleh dari dinas-dinas yang ditunjuk oleh walikota.	Sumber daya finansial tidak pernah menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Hambatan yang berasal dari sumber daya terjadi ketika pemilihan anggota LKM dan TIPP dilakukan tidak berdasarkan keahlian sehingga tetapi berdasarkan nilai-nilai luhur. Selain itu pengadaan lahan untuk warga juga menjadi hambatan karena alih hak milik lahan masih dalam proses sehingga warga belum mendapatkan sertifikat lahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program menjadi tertunda. Hambatan lain yang mengganggu pelaksanaan program adalah material yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur sering mengalami keterlambatan.

Sumber: data diolah